

Wisata Mangrove (Studi Pola Penguasaan Ruang Masyarakat
Lokal Dalam Mendorong Ekonomi Kerakyatan Desa Cempae
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu guna Menperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

WAWAN KURNIAWAN

10538 286 813

JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Wawan Kurniawan**, NIM 10538286813 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 049 Tahun 1439 H/ 2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018.

21 Ramadhan 1439 H
Makassar, -----
06 Juni 2018 M

PANITIA UJIAN

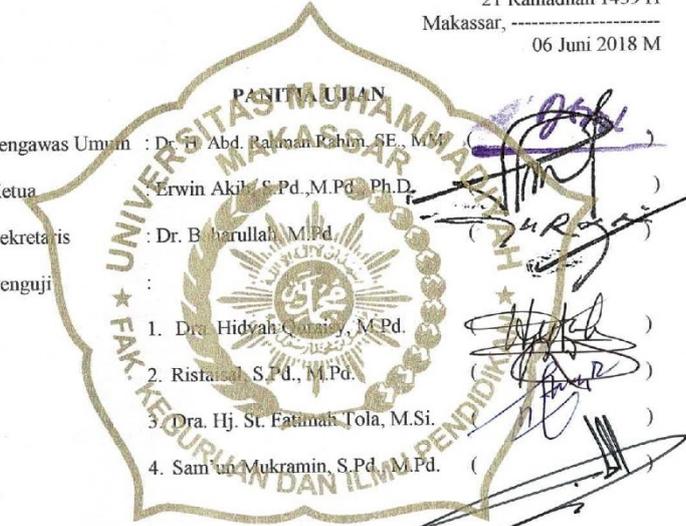
Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. B. Harullah, M.Pd.

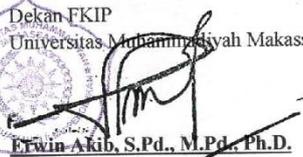
Penguji :

1. Dra. Hidayah Qomari, M.Pd.
2. Ristanda, S.Pd., M.Pd.
3. Dra. Hj. St. Fatimah Tola, M.Si.
4. Sam'un Mukramin, S.Pd., M.Pd.



Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar



Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi



Drs. H. Hafid, M.Pd.
NIM: 57-474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Wisata Mangrove (Studi Pola Penguasaan Ruang Masyarakat Lokal dalam Mendorong Ekonomi Kerakyatan Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai).

Nama : Wawan Kurniawan
 NIM : 10538286813
 Prodi : Pendidikan Sosiologi
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggung jawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Juni 2018

Disahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd.


Risfaisal, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
 Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
 Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D
 NBM: 860 904


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
 NBM: 578 474

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wawan Kurniawan

Nim : 10538 2868 13

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : Wisata Mangrove (Studi Pola Penguasaan Ruang Masyarakat Lokal Dalam Mendorong Ekonomi Kerakyatan Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, April 2018

Yang Membuat Pernyataan

Wawan Kuniawan

SURAT PERJANJIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Kurniawan

Nim : 10538 2868 13

Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai dengan selesainya skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat dalam penyusunan skripsi saya).
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir (1), (2), dan (3) maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, April 2018

Yang Membuat Perjanjian

Wawan Kurniawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kesuksesan membutuhkan pengorbanan dan kesabaran dan engkau dikatakan sukses jika telah mampu membuat orang lain merasakan kesuksesanmu, dan tidak ada sesuatu didapatkan dengan mudah melainkan membutuhkan perjuangan yang tak kenal waktu baik siang maupun malam dan sembari berserah diri kepadanya.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Kedua orang tuaku, serta kakak dan adikku tercinta yang selalu mendoakan dan merelakan segalanya demi kesuksesanku

ABSTRAK

Wawan Kurniawan. 2018. Wisata Mangrove (Studi Pola Penguasaan Ruang Masyarakat Lokal Dalam Mendorong Ekonomi Kerakyatan Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai). Skripsi, Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing Hidayah Quraisy dan Risfaisal

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk mengetahui pola penguasaan ruang wisata mangrove dalam mendorong ekonomi masyarakat lokal dan dampak ekonomi dari adanya wisata mangrove tersebut. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi para pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove di Kelurahan Tongke-Tongke. Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai karena wisata ini memberikan dampak ekonomi yang bagus bagi masyarakat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif kualitatif. Adapun sumber analisis ini berasal dari pengelolah data yang di peroleh dari wawancara secara mendalam.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai pola penguasaan ruang wisata mangrove dalam mendorong ekonomi masyarakat lokal dan dampak ekonomi dari adanya wisata mangrove tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pola penguasaan ruang wisata mangrove di Desa Tongke-tongke yaitu dengan cara memperbanyak wahana dan menjaga kebersihan wisata mangrove. Untuk mendorong pengunjung sebenarnya dilihat dari tampak fisik baik itu dari sarana dan prasarana yang di sediakan di tempat wisata tersebut karena semakin banyak pengunjung yang datang itu akan berpengaruh pada pendapatan ekonomi masyarakat lokal. Sedangkan dampak ekonomi wisata mangrove di Desa tongke-tongke berdampak positif bagi masyarakat dalam membantu meningkatkan perekonomian untuk menunjang kehidupannya. Masyarakat sangat bersyukur dengan adanya wisata mangrove ini karena mereka tidak lagi susah dalam hal pekerjaan.

Kata Kunci: Wisata Mangrove, Penguasaan Ruang, Ekonomi Kerakyatan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur atas izin dan petunjuk Allah Swt, sehingga skripsi dengan judul: **“Wisata Mangrove (Studi Pola Penguasaan Ruang Masyarakat Lokal Dalam Mendorong Ekonomi Kerakyatan Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)”** dapat penulis selesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt. Atas apa yang di berikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat di ucapkan dengan kata-kata dan tulisan dengan kalimat apapun. Demikian pula salam dan Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Yang merupakan panutan dan contoh kita diakhirat zaman.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akademik dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus pada jurusan pendidikan sosiologi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan yang berorientasi pada penerapan dan sekaligus latihan untuk ilmu yang telah diperoleh.

Penulis menyadari bahwa terselaksainnya skripsi ini bukanlah semata hasil dari jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi semua ini terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Teristimewah penulis hanturkan ucapan terimah kasih kepada

kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Baharuddin dan Ibunda Hj. Nuraeni yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala jerih payahnya serta selalu mendoakan dan, memberi semangat kepada penulis. Penghargaan yang setinggi tingginya dan terima kasih juga penulis hanturkan kepada Dra. Hidayah Quraisyi, M.Pd, pembimbing I dan Risfaisal, S.Pd, M.Pd., pembimbing II, atas kesediannya mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, mulai dari penyusun proposal ini dapat di rampungkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis hanturkan kepada Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Uversitas Muhammadiyah Makassar. Drs. H. Nurdin, M.Pd, Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Muhammad Akhir, S.Pd, M.Pd, sekertaris jurusan program studi pendidikan sosiologi. Segenap jurusan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar atas bekal ilmu yang telah di berikan kepada penulis.

Dan juga teman-teman dan mahasiswa jurusan Sosiologi khususnya angkatan 2013 kelas G dan juga teman seperjuangan Reka Fajriani, Rahmawan, terima kasih atas perhatian, semangat, dan kebersamaannya selama ini semoga kesuksesan selalu menyertai dalam setiap usaha-usaha kita.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselasaikannya karya ini dapat di terima di sisi Allah Swt, serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan yang di sebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan seran dan kritik yang konstruksi dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. Bermohon semoga berkat dan rahmat serta limpahan pahala yang berlipat ganda selalu dicurahkan kepada kita. Dan semoga niat baik, serta usaha yang sungguh-sungguh mendapat ridho disisi-Nya. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Makassar, April 2018

Penulis,

Wawan Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSR TAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA KONSEP	
A. Kajian Pustaka	11
1. Penelitian Terdahulu	11
2. Definisi Hutan Mangrove	12
3. Penguasaan Ruang.....	18
4. Masyarakat Lokal	24

5. Ekonomi Kerakyatan.....	28
B. Kajian Teori	34
C. Kerangka Pikir	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
C. Informan Penelitian.....	44
D. Fokus Penelitian.....	45
E. Instrumen Penelitian	46
F. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	46
G. Teknik Pengumpulan Data.....	47
H. Teknik Analisis Data	48
I. Etika Penelitian	49

BAB IV GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN

A. Histori Wilayah.....	51
B. Informan Penelitian.....	62

BAB V POLA PENGUASAAN RUANG WISATA MANGROVE DALAM MENDORONG EKONOMI MASYARAKAT LOKAL

A. Hasil Penelitian	65
B. Pembahasan Hasil Penelitian	72
C. Kesesuaian Teori dengan Hasil Penelitian.....	77

BAB VI DAMPAK EKONOMI WISATA MANGROVE

A. Hasil Penelitian	79
B. Pembahasan Hasil Penelitian	86
C. Kesesuaian Teori dengan Hasil Penelitian.....	90

BAB VII SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	97
RIWAYAT HIDUP	122

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel . 3.1. Kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti	46
Tabel . 4.1. Identitas informan penelitian.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar .2.1 Bagan Kerangka Konsep.....	43
Gambar .3.1. Bagan Triangulasi.....	52
Gambar .4.1. Peta Kabupaten Sinjai.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Pedoman Wawancara.....	100
Dokumentasi.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mangrove harus selalu dijaga kelestariannya agar fungsi zekologinya tetap lestari. Dan bertujuan untuk menganalisis potensi hutan mangrove serta strategi pengelolaan hutan mangrove yang terbaik untuk dilaksanakan di Kabupaten Sinjai.

Hasil ini menunjukkan stretegi dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai yaitu masyarakat melakukan penanaman berdasarkan potensi yang ada, membentuk kawasan hutan lindung mangrove yang tidak dapat diganggu, lebih meningkatkan peran organisasi masyarakat, lebih memberdayakan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penebangan mangrove, perlu sentuhan teknologi dalam pengembangan mangrove, masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan tentang mangrove peningkatan peran pemerintah, penyuluhan tentang lingkungan dan ekosistem mangrove, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan mangrove, peningkatan pendidikan/pelatihan kepada masyarakat, serta melakukan musyawarah antara masyarakat dan pemerintah tentang pemanfaatan dan pengelolaan mangrove, sosialisasi penerapan peraturan pemerintah tentang lingkungan, melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan mangrove, pemerintah dan

masyarakat bersama-sama mendukung pengelolaan mangrove, peningkatan penanaman mangrove di sekitar pesisir pantai. Pada prinsipnya posisi model pengelolaan hutan mangrove yang di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai masuk dalam kategori pertumbuhan.

Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang mempunyai peranan penting ditinjau dari sisi ekologis maupun aspek sosial ekonomi. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang ditumbuhi dengan pohon bakau (*mangrove*) yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove mempunyai fungsi ganda dan merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan siklus biologi di suatu perairan.

Sebagai suatu ekosistem dan sumberdaya alam, pemanfaatan mangrove diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia dan untuk mewujudkan pemanfaatannya agar dapat berkelanjutan, maka ekosistem mangrove perlu dikelola dan dijaga ke-beradaannya. Kerangka pengelolaan hutan mangrove terdapat dua konsep utama. Pertama, perlindungan hutan mangrove yaitu suatu upaya perlindungan terhadap hutan mangrove menjadi kawasan hutan mangrove konservasi. Kedua, rehabilitasi hutan mangrove yaitu kegiatan penghijauan yang dilakukan terhadap lahan-lahan yang dulu merupakan salah satu upaya rehabilitasi yang bertujuan bukan saja untuk mengembalikan nilai estetika, tetapi yang paling utama adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan

mangrove yang telah ditebang dan dialihkan fungsinya kepada kegiatan lain.

Hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai dan sungai secara umum menyediakan habitat bagi berbagai jenis ikan. Hutan mangrove sebagai salah satu lahan basah di daerah tropis dengan akses yang mudah serta kegunaan komponen biodiversitas dan lahan yang tinggi telah menjadikan sumberdaya tersebut sebagai sumberdaya tropis yang kelestariannya akan terancam dan menjadi salah satu pusat dari isu lingkungan global. Konversi hutan mangrove terus meningkat untuk dijadikan lahan pertanian atau tambak ikan/udang, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas ekosistem tersebut.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang masih memiliki hutan mangrove yang cukup luas adalah Kabupaten Sinjai. Pengelolaan hutan mangrove di daerah ini telah dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, mengingat beberapa waktu yang lalu ketika mereka melaut ke berbagai daerah, maka pada saat kembali mereka membawa bibit mangrove untuk selanjutnya ditanam di sekitar pantai karena mereka meyakini bahwa tanaman mangrove memiliki banyak fungsi, di antaranya dapat menahan angin kencang, ombak yang besar dan sebagainya. Selanjutnya, wilayah di Kabupaten Sinjai yang masih memiliki hutan mangrove yang cukup luas adalah Desa Tongke-Tongke dan Kelurahan Samataring. Pada tahun 1995 Desa Tongke-Tongke dan Lingkungan Pangasa Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai telah melakukan penanaman

kembali terhadap hutan mangrove yang telah mengalami degradasi akibat penebangan secara sembarangan.

Hutan mangrove yang telah ditanam oleh masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan, dan setelah 18 tahun kemudian, tanaman mangrove tersebut sudah dapat dimanfaatkan, dan setelah tanaman tersebut ingin dimanfaatkan oleh masyarakat, timbul Peraturan Pemerintah Kabupaten Sinjai tentang pelarangan penebangan hutan mangrove. Luas hutan di Kelurahan Tongke-Tongke merupakan hutan terluas yang ada di Kabupaten Sinjai, termasuk hutan mangrovenya.

Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu sumberdaya hayati yang sangat penting untuk kehidupan manusia terutama dalam peningkatan kesejahteraan sehingga untuk kehidupan manusia terutama dalam peningkatan kesejahteraan dalam kelangsungannya diperlukan adanya kesadaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove dengan asas kelestarian ditetapkan dalam UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Menyadari akan pentingnya manfaat hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat khususnya daerah pesisir, baik manfaat langsung maupun tidak langsung, maka sumberdaya hutan mangrove harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Hutan mangrove sebagai suatu ekosistem mempunyai fungsi fisik, yaitu mengendalikan abrasi pantai, mengurangi tiupan angin kencang dan

terjangan gelombang laut, mempercepat laju sedimentasi yang akhirnya menimbulkan tanah timbul sehingga daratan bertambah luas, dan mengendalikan intrusi air laut. Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat di Desa Tolai Barat dalam melakukan penanaman kembali bibit mangrove di wilayah pesisir pantai. Salah satunya dengan membuat kelompok-kelompok pelestarian mangrove.

Hutan mangrove harus selalu dijaga kelestariannya agar fungsi ekologiannya tetap lestari. Dan bertujuan untuk menganalisis potensi hutan mangrove serta strategi pengelolaan hutan mangrove yang terbaik untuk dilaksanakan di Kabupaten Sinjai.

Hasil ini menunjukkan strategi dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai yaitu masyarakat melakukan penanaman berdasarkan potensi yang ada, membentuk kawasan hutan lindung mangrove yang tidak dapat diganggu, lebih meningkatkan peran organisasi masyarakat, lebih memberdayakan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penebangan mangrove, perlu sentuhan teknologi dalam pengembangan mangrove, masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan tentang mangrove peningkatan peran pemerintah, penyuluhan tentang lingkungan dan ekosistem mangrove, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan mangrove, peningkatan pendidikan/pelatihan kepada masyarakat, serta melakukan musyawarah antara masyarakat dan pemerintah tentang pemanfaatan dan

pengelolaan mangrove, sosialisasi penerapan peraturan pemerintah tentang lingkungan, melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan mangrove, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendukung pengelolaan mangrove, peningkatan penanaman mangrove di sekitar pesisir pantai serta. Pada prinsipnya posisi model pengelolaan hutan mangrove yang di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai masuk dalam kategori pertumbuhan.

Meningkatnya kecenderungan perusakan ekosistem hutan mangrove seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat lokal seperti, penebangan pohon mangrove yang dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga dan bara arang untuk diperdagangkan, tanpa memperhatikan daya dukung dan daya pulihnya, serta meningkatnya aktivitas pencari kepiting (*pasodok*) yang mencari kepiting ke wilayah ekosistem mangrove juga memicu peningkatan kerusakan hutan mangrove.

Upaya pelestarian kembali hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan beberapa waktu lalu, telah menjadi perhatian oleh masyarakat Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan melakukan penanaman kembali terhadap hutan mangrove yang rusak melalui swadaya masyarakat.

Masalah berikutnya adalah penebangan secara liar baik digunakan sebagai kayu bakar, atau dijadikan arang untuk dijual, perluasan areal tambak secara tidak terkendali, sehingga apabila hal ini tidak segera

dihentikan, maka suatu saat kita tidak melihat lagi hutan mangrove di Kabupaten Sinjai dan hal ini merupakan bencana besar.

Berdasarkan kondisi hutan mangrove tersebut, perlu dilaksanakan suatu upaya rehabilitasi hutan mangrove oleh Pemerintah Daerah yang didukung dengan partisipasi masyarakat. Keberhasilan maupun kegagalan dalam rehabilitasi hutan mangrove tidak terlepas dari peran Pemerintah khususnya di daerah melalui instansi yang berwenang, lebih dominan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove.

Masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove sangat dibutuhkan, karena mereka merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan hutan mangrove. Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove sangat diperlukan, agar kelestarian ekosistem hutan mangrove dapat terjaga dan terpelihara. Strategi pengelolaan ekosistem mangrove dengan melibatkan masyarakat lokal dipandang lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan satu arah yang hanya melibatkan pemerintah.

Kawasan wisata Mangrove Tongke-Tongke memiliki sejumlah sarana dan prasarana seperti kamar mandi, serta lokasi parkir baik roda dua maupun roda empat sudah tersedia di tempat wisata ini. Fasilitas lainnya yaitu Kantor Pengelola, Mushollah, Kios dan Cafeteria, Dermaga Wisata Perahu, Area Pemancingan serta Area Pembibitan.

Untuk masuk dalam kawasan hutan Mangrove ini pengunjung hanya membayar biaya parkir jika membawa kendaraan. Untuk kendaraan

roda dua, pengunjung harus membayar Rp. 2000, sedangkan untuk kendaraan roda empat, pengunjung membayar Rp. 5000.

Adapun yang melatarbelakangi sehingga judul penelitian ini melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan hutan mangrove, maka akan timbul rasa tanggung jawab di dalam diri mereka akan pentingnya fungsi hutan mangrove bagi daerah pesisir. Berdasarkan 2 hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengelolaan hutan mangrove kabupaten sinjai. Lokasi penelitian ini berada di ambang kritis, seperti penebangan hutan secara liar, baik digunakan sebagai kayu bakar, atau dijadikan arang untuk dijual, perluasan area tambak secara tidak terkendali, jika hal ini tidak secepatnya dihentikan maka akan menimbulkan bencana besar. karena sebagian area hutan mangrove sudah dikonversi menjadi pemukiman, pembangunan wisata dan sebagainya, maka dari itu pesisir pantai ini terancam abrasi dari gelombang laut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pola penguasaan ruang wisata mangrove dalam mendorong ekonomi masyarakat lokal di Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimanakah dampak ekonomi wisata mangrove di Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak di capai, karena tujuan akan memberikan arah yang jelas, tolak ukur dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola penguasaan ruang wisata mangrove dalam mendorong ekonomi masyarakat lokal di Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui dampak ekonomi wisata mangrove di Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat manambah khzanah pengetahuan atau sebagai bahan informasi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove kabupaten sinjai.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Dapat menjadi motivasi setempat dalam mengembangkan potensi yang di miliki sebagai upaya mengatasi masalah secara mandiri yang tentunya di topang oleh program-program pemerintah.

- b. Bagi pemerintah

Diharapkan jadi bahan pertimbangan terhadap pelestarian parawisata, baik pemerintah Desa maupun pemerintah Kabupaten.

c. Bagi lembaga terkait

Sebagai sumber data atau bentuk masukan bagi pemerintah sehingga dapat mempercepat penanggulangan masyarakat dalam mengelolah hutan mangrove.

d. Bagi peneliti

Sebagai latihan untuk menyusun buah pikiran secara tertulis dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang relevan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Sapruddin dan Halidah (2012) meneliti tentang Potensi dan Nilai Manfaat Jasa Lingkungan Hutan Mangrove di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah : (1) sejumlah masyarakat pesisir Sinjai Timur melakukan pemanfaatan hutan mangrove secara langsung berupa kayu, buah, dan daun bakau, (2) nilai ekonomi manfaat langsung sumber daya hutan mangrove paling besar didapat dari produk kayu untuk bahan bangunan, selanjutnya produk buah bakau sebagai sumber benih, produk kayu bakar, dan paling kecil diperoleh dari daun bakau sebagai produk pakan ternak.

Patang (2012) meneliti tentang Analisis Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove (Kasus di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai). Adapun hasil penelitian ini adalah : strategi pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai yaitu masyarakat melakukan penanaman berdasarkan potensi yang ada, membentuk kawasan hutan lindung mangrove yang tidak dapat diganggu, lebih meningkatkan peran organisasi masyarakat dan lebih memberdayakan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penebangan mangrove, perlu sentuhan teknologi dalam pengembangan mangrove, masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan

tentang mangrove serta peningkatan peran pemerintah, penyuluhan tentang lingkungan dan ekosistem mangrove, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan mangrove, peningkatan pendidikan/pelatihan kepada masyarakat, serta menumbuhkan musyawarah antara masyarakat dan pemerintah tentang pemanfaatan dan pengelolaan mangrove, sosialisasi penerapan peraturan pemerintah tentang lingkungan, melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan mangrove, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendukung pengelolaan mangrove, peningkatan penanaman mangrove di sekitar pantai.

Damayanti (2016) meneliti tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Sinjai. Adapun hasil penelitian ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove meliputi rehabilitasi di lakukan bertujuan untuk memulihkan kembali ekosistem sumber daya pesisir yang telah mengalami kerusakan, pemeliharaan di lakukan pengamatan terhadap kondisi bibit yang telah di tanam di areal mangrove tersebut, pengawasan yang di lakukan terhadap hutan mangrove tersebut adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang beraktifitas di areal mangrove.

2. Definisi Hutan Mangrove

Menurut Supriatna (2008) hutan mangrove merupakan salah satu habitat khas pesisir dan juga estuaria, yang di Indonesia luasnya saat ini mencapai 24.000 km² atau sekitar 1,3 % dari luas Indonesia. Vegetasi yang

hidup di mangrove harus mampu beradaptasi dengan salinitas yang tinggi dan oxygen yang rendah (anoxic). Vegetasi mangrove di dominasi oleh family rhizophoraceae dengan cirri utama menghasilkan buah berbentuk kappel selam agar dapat mengapung di laut dan menancap di pesisir. Setiap jenis beradaptasi dengan cara yang unik terhadap keadaan anoxic. Contohnya akar napas dengan lentisel berukuran besar dan lubang pernafasan pada batang rhizo phoraceae, akar yang tumbuh melengkung pada bruguiera, dan akar yang menjulang ke atas seperti pensil pada sonneratia dan avicennia.

Menurut Mac Nae dalam Supriharyono (2007) kata *mangrove* mempunyai dua arti, *pertama* sebagai komunitas, yaitu komunitas atau masyarakat tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap garam / salinitas dan pasang surut air laut, dan *kedua* sebagai individu spesies. Karenanya supaya tidak rancu, Mac Nae kemudian menggunakan istilah *mangal* apabila berkaitan dengan komunitas hutan dan *mangrove* untuk individu tumbuhan.

Menurut Departemen Kehutanan dalam Fadhlani (2010) hutan mangrove merupakan hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim sedangkan daerah pantai adalah daratan yang terdapat di bagian hilir daerah aliran sungai (DAS) yang berbatasan dengan laut dan masih dipengaruhi oleh pasang surut dengan kelerengannya kurang dari 8%.

Bakau (mangrove) merupakan suatu komponen atau sistem yang terdiri atas komponen mayor dan komponen minor. Yakni mangrove yang hanya dapat hidup di lingkungan mangrove (pasang surut). Komponen minor merupakan komponen mangrove yang dapat hidup di luar lingkungan mangrove (tidak langsung kena pasang surut air laut). Mangrove yang merupakan komponen mayor disebut juga dengan mangrove sejati, sedangkan mangrove yang termasuk komponen minor disebut dengan mangrove ikutan (Erlin, 2011).

Menurut Himakel (2012) fungsi dari hutan mangrove adalah:

- a. Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, penahan lumpur dan penahan sedimen (sediment trap) yang diangkut oleh aliran air permukaan.
- b. Sebagai penghasil sejumlah besar detritus, terutama yang berasal dari serasah daun dan ranting pohon mangrove yang rontok. Sebagian dari detritus ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi organisme pemakan detritus detritivore dan sebagian lagi didekomposisi oleh bakteri decomposer menjadi bahan-bahan anorganik (nutrien) yang berperan dalam menyuburkan perairan dan tentu saja kesuburan mangrove itu sendiri.
- c. Sebagai daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari makan (feeding ground) dan daerah pemijahan (spawning ground). Berbagai macam biota perairan baik yang hidup diperairan pantai maupun di lepas pantai. Disamping itu ada beberapa organisme perairan yang

menjadikan ekosistem mangrove sebagai habitat utamanya. Fungsi ini memungkinkan ekosistem mangrove berperan dalam memberi energi bagi revitalisasi sumberdaya perikanan di laut. Selain organisme perairan beberapa hewan dari jenis reptil, burung dan primata juga menjadikan mangrove menjadi habitatnya.

Ghufran (2012) Ekologi ekosistem mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem hutan, air dan alam sekitarnya. Fungsi atau manfaatnya antara lain :

a. Habitat Biota

Ekosistem mangrove merupakan habitat (tempat hidup) berbagai biota, baik biota akuatik maupun biota daratan. Ketika menyebut ekosistem mangrove, maka yang pertama kali tergambar adalah tumbuh-tumbuhan halofit yang hidup di daerah pesisir pasang-surut. Flora yang tumbuh pada ekosistem mangrove di Indonesia dikenal mempunyai keragaman jenis yang tinggi.

b. Persinggahan Fauna Migran

Ekosistem mangrove merupakan tempat persinggahan fauna migran, baik fauna darat maupun fauna laut. Tumbuhan mangrove menyediakan tempat bertengger dan beristirahat yang nyaman bagi burung-burung migran. Demikian juga sumber makanan yang melimpah bagi burung-burung tersebut ketika surut. Fauna lain yang singgah di ekosistem mangrove adalah penyu. Di sekitar ekosistem

mangrove, terutama daerah berpasir merupakan daerah bagi penyu untuk bertelur.

c. Tempat Pemijahan, Pengasuhan, dan Mencari Makan

Lingkungan ekosistem mangrove menjadi tempat yang cocok bagi biota akuatik untuk memijah dan membesarkan anaknya. Akar-akar tumbuhan selain menyediakan ruangan bagi biota untuk bersembunyi, sistem perakaran mangrove sangat efektif meredam gelombang dan arus laut sehingga telur dan anak ikan tidak hanyut. Karena itu, telur dan anak biota akuatik aman dari serangan predator maupun arus dan gelombang.

d. Pendukung Ekosistem Laut

Karena berada di pesisir dan antara daratan dan lautan, ekosistem mangrove menjadi penting sebagai pelindung lautan dan sekaligus daratan. Mangrove dapat menangkap sedimen dari daratan yang diangkut oleh air tawar melalui sungai, drainase, dan sebagainya, kemudian diendapkan di dasar mangrove. Karena air dan sedimen ini tidak langsung menyerbu masuk ke ekosistem padang lamun dan terumbu karang. Sebab sedimen dan air tawar yang berlebihan masuk ke area tersebut dapat membunuh berbagai biota di dalamnya.

e. Pelindung Pantai

Perakaran mangrove yang rapat dan terpancang dapat berfungsi efektif meredam hantaman gelombang dan ombak. Kekuatan angin

dan badai yang dahsyat akan berkurang ketika mencapai ekosistem mangrove yang memiliki hutan lebat. Demikian pula gelombang pasang atau tsunami akan mengecil ketika mencapai ekosistem mangrove yang berhutan lebat. Daya rusak gelombang menjadi berkurang karena kekuatannya telah direduksi oleh ekosistem mangrove.

Sedangkan menurut Lasibani dan Eni dalam Senoaji dan Hidayat (2016) manfaat ekosistem mangrove yang berhubungan dengan fungsi fisik adalah sebagai mitigasi bencana seperti peredam gelombang dan angin badai bagi daerah yang ada di belakangnya, pelindung pantai dari abrasi, gelombang air pasang, tsunami, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan, pencegah intrusi air laut ke daratan, serta dapat menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu.

Kondisi Hutan Bakau Indonesia. Melihat definisi, pengertian, ciri-ciri, fungsi dan manfaat hutan bakau tersebut kita seharusnya bisa berbangga diri menjadi negara dengan luas kawasan hutan mangrove terluas di dunia. Berdasarkan data FAO yang dirilis tahun 2007, walau hanya memiliki hutan bakau seluas 3,062,300 ha, luas hutan bakau di Indonesia mencapai 19% dari total hutan bakau di seluruh dunia. Ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan luas hutan bakau paling luas di dunia melebihi Australia (10%) dan Brazil (7%).

3. Penguasaan Ruang

a. Sistem Pengelolaan Hutan Mangrove

Menurut Patang (2012) Pengelolaan hutan mangrove pada dasarnya dilakukan penanaman berdasarkan potensi yang ada, membentuk kawasan hutan lindung mangrove yang tidak dapat diganggu, lebih meningkatkan peran organisasi masyarakat dan lebih memberdayakan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penebangan mangrove, perlu sentuhan teknologi dalam pengembangan mangrove, masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan tentang mangrove serta peningkatan peran pemerintah, penyuluhan tentang lingkungan dan ekosistem mangrove, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan mangrove, peningkatan pendidikan/pelatihan kepada masyarakat, serta menumbuhkan musyawarah antara masyarakat dan pemerintah tentang pemanfaatan dan pengelolaan mangrove, sosialisasi penerapan peraturan pemerintah tentang lingkungan, melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan mangrove, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendukung pengelolaan mangrove, peningkatan penanaman mangrove di sekitar pantai.

Ketentuan mengenai proteksi hutan Mangrove semuanya didasarkan atas ketentuan tentang perlindungan hutan yang berlaku di darat, misalnya UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam

Hayati dan Ekosistemnya, PP No. 28 tentang Perlindungan Hutan, Keppres No.32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Instruksi Mendagri No. 34/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Daerah. Peraturan dan ketentuan mengenai proteksi hutan lumayan banyak, tetapi peraturan dan ketentuan mengenai rehabilitasi, pengawasan, dan penegakan hukum di wilayah hutan Mangrove dapat dikatakan belum ada. Lemahnya sistem pengelolaan hutan Mangrove yang berlaku sekarang diperkirakan merupakan penyebab utama terjadinya degradasi hutan Mangrove di sepanjang pesisir Kaltim.

b. Konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Konsep PHBM menurut SK Gubernur Jawa Tengah No.24/2001 adalah "suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama masyarakat dengan jiwa berbagi antara PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan, pihak yang berkepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat Sumber Daya Hutan (SDH) dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Para pihak di dalam perjanjian PHBM yaitu PT.Perhutani, Masyarakat desa hutan dan pihak terkait (Pemerintah(Propinsi,K abupaten/Kota), LSM, Lembaga ekonomi masyarakat, lembaga sosial masyarakat, Usaha Swasta, lembaga pendidikan dan lembaga donor).

Menurut Aminah (2011) Semua pihak berbagi pengelolaan dengan kaidah-kaidah keseimbangan, keselarasan, keberlanjutan, kesesuaian dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling

mendukung, berdasarkan : keadilan dan demokratis, keterbukaan dan kebersamaan, pembelajaran bersama dan saling memahami, kejelasan hak dan kewajiban, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kerjasama kelembagaan, perencanaan partisipatif, kesederhanaan sistem prosedur, kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik hukum wilayah dan keanekaragaman sosial budaya.

Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator, PHBM memberikan arah pengelolaan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional (www.citramong.wordpress.com) dengan tujuan nyata antara lain: (1) meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, (2) meningkatkan kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat, (3) meningkatkan peran dan tanggung jawab PT. Perhutani, masyarakat desa dan pihak yang berkepentingan, (4) meningkatkan mutu dan sumberdaya hutan, (5) meningkatkan produktivitas dan keamanan hutan, (6) menciptakan lapangan kerja, (7) meningkatkan kesempatan berusaha, (8) meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.

Ruang lingkup kegiatan PHBM dibagi menjadi 2, yaitu :

(1) Kegiatan dalam kawasan hutan, meliputi : pengembangan *Agrowiforestry* dengan pola bisnis (pengamanan hutan melalui pola berbagi hak, kewajiban dan tanggung jawab), tambang, galian, wisata, pengembangan Flora dan Fauna, dan pemanfaatan sumber daya air.

(2) Kegiatan di luar kawasan hutan, meliputi : pembinaan masyarakat desa hutan, pemberdayaan kelembagaan kelompok tani hutan, pemberdayaan

lembaga desa, pengembangan ekonomi kesejahteraan, pengembangan hukum rakyat, dan antuan sarana dan prasarana desa hutan.

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan konsep memiliki berbasis sama dengan pendekatan ADS (Atur Diri Sendiri) sebagaimana yang dikemukakan oleh Otto Sumarwoto dan Satjipto Raharjo bahwa pendekatan kerjasama dalam mengelola sumber daya hutan, PHBM berwujud sebuah kesepakatan/perjanjian antara pemerintah (Perhutani), sekelompok masyarakat adat setempat dan pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak diharapkan memiliki kedudukan yang sama (setara) dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

PHBM bisa dikategorikan sebagai upaya karena bersifat preventif yaitu sebagai upaya pencegahan terjadi tindak pidana pencurian kayu. Hal ini disebabkan hak-hak masyarakat sebagian telah diakui dengan kesetaraan posisi dalam kerjasama PHBM dalam pengelolaan sumber daya hutan. Mereka memperoleh hasil yang lebih baik atau manfaat lebih banyak dibanding dengan mencuri. Efek lain yang dapat dipetik dalam perjanjian PHBM masyarakat akan memiliki kesadaran akan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya hutan sehingga mereka akan turut menjaga sumberdaya hutan yaitu dengan menghentikan penebangan hutan yang semena-mena dan ilegal dan juga otomatis masyarakat juga akan berperan aktif dalam pengawasannya agar sumber daya hutan itu lestari dan

berkelanjutan karena kondisi yang demikian akan mempengaruhi keberlangsungan PHBM dan mendapatkan hasil yang optimal.

PHBM juga merupakan konsep yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhana (moral religius), nilai kemanusiaan (humanistik), dan nilai kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik dan berkeadilan sosial). Hal ini terwujud karena adanya PHBM, berarti ketenangan terjaga, hubungan baik kembali menjadi harmonis karena terdapat suatu persetujuan yang merupakan kesepakatan bersama yang masing-masing pihak merasa terpenuhinya kepentingan yang dirasakan cukup fair dan adil. Hal tersebut akan mengembalikan keserasian hubungan antara semua manusia, antara manusia dan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dari makhluk Tuhan yang mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup sebagaimana banyak diwajibkan di dalam semua agama yang ada di Indonesia.

Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) juga tidak meniadakan peran dari pemerintah daerah, hal ini selaras dengan era otonomi daerah yang mana peran daerah lebih ditingkatkan dibandingkan pada era sebelum otonomi daerah. Hal tersebut biasa dilihat dari hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian PHBM ini, adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak antara lain :

- 1) Hak dan kewajiban masyarakat desa antara lain, hak meliputi : menyusun rencana pelaksanaan PHBM, melaksanakan pelaksanaan PHBM, mengevaluasi pelaksanaan PHBM, memperoleh manfaat dari hasil

kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi dan dikontribusikannya. Sedangkan kewajibannya adalah : melindungi, menjaga, dan melestarikan sumber daya hutan untuk berkelanjutan fungsi dan manfaatnya, serta memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.

- 2) Hak dan kewajiban perhutanan antara lain, hak meliputi : menyusun rencana pelaksanaan PHBM, melaksanakan pelaksanaan PHBM, mengevaluasi pelaksanaan PHBM, memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi dan dikontribusikannya, dan memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam perlindungan sumber daya hutan untuk berkelanjutan fungsi dan manfaatnya. Sedangkan kewajibannya adalah : melindungi, menjaga dan melestarikan sumber daya hutan untuk berkelanjutan fungsi dan manfaatnya, memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya, dan memfasilitasi dalam proses PHBM.
- 3) Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain, hak meliputi : memperoleh PBB, memperoleh Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), memperoleh manfaat dan hasil kegiatan baik berupa kayu dan non-kayu (dalam bentuk uang/sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam kegiatan PHBM). Sedangkan kewajibannya adalah : membimbing dan memberdayakan masyarakat desa hutan, mengamankan sumber daya

hutan, dan memfasilitasi kegiatan PHBM serta mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

4. Masyarakat Lokal

Masyarakat: Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Masyarakat menurut istilah : *society* yaitu sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Soekanto (2012 : 1) , masyarakat pada umumnya memiliki ciri-ciri antara lain : (a) manusia yang hidup bersama; sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang, (b) bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan

yang mengatur hubungan antarmanusia, (c) sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan, dan (d) merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

Masyarakat lokal merupakan suatu kelompok atau komunitas yang berasal dari daerahnya sendiri dan menjunjung tinggi budaya yang di anutnya. ciri budaya lokal dapat dikenali dalam bentuk kelembagaan sosial yang dimiliki oleh suatu suku bangsa. Dalam lembaga sosial, hubungan sosial diantara anggotanya sangat bersifat pribadi dan didasari oleh loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin dan gengsi sosial yang dimiliki. Dalam lembaga sosial, hubungan sosial diantara anggotanya sangat bersifat pribadi dan didasari oleh loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin dan gengsi sosial yang dimiliki.

Menurut Suprayitno (2008) Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya, dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku mereka merupakan komponen yang paling krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Perilaku masyarakat yang positif dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang lestari. Sedangkan, bentuk perilaku yang negatif akan mengarah pada terciptanya pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk melibatkan masyarakat lokal

(partisipasi) dalam rangka pelestarian hutan merupakan hal yang mendasar dan positif, dimana kesadaran kritis masyarakat dibangun dan dikembangkan, sehingga masyarakat dapat menjadi sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan.

Tipe-tipe masyarakat menurut Kingley Davis dalam Soekanto (2007) ada empat kriteria, yaitu jumlah penduduk, luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan organisasi masyarakat yang bersangkutan.

Berbagai tipe masyarakat ini memiliki beberapa persamaan. Salah satunya adalah kesediaan saling membantu antar-warga masyarakat ketika menghadapi kesulitan (krisis). Namun, umumnya warga masyarakat akan enggan memberikan bantuan kepada anggota yang hidup tidak sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Mekanisme ini relatif sudah terlembaga dalam masyarakat.

Kemudian Pengertian masyarakat menurut Thomas Hobbes bahwa masyarakat (komunitas) adalah proses alamiah dimana orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan mereka, Hobbes mengemukakan bahwa kepentingan diri pribadi dapat didapati dalam kelompok.

Karakteristik masyarakat adalah : (a) aglomerasi dari unit biologis dimana setiap anggota dapat melakukan reproduksi dan beraktivitas, (b) memiliki wilayah tertentu, (c) memiliki cara untuk berkomunikasi, (d)

Terjadinya diskriminasi antara warga masyarakat dan bukan warga masyarakat, dan (e) secara kolektif menghadapi ataupun menghindari musuh.

Di Indonesia, berbagai jenis sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berdasarkan kearifan tradisional sangat banyak ragamnya. Namun demikian dalam prakteknya tidak semua masyarakat lokal mempunyai kearifan tradisional tersebut. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang bersumber dari pemahamannya terhadap alam sekitar dan menadaptasikannya pada praktek pengelolaan sumberdaya alam pada berbagai jenis kondisi lingkungan hidup. Bentuk yang bisa kita lihat, misalnya bagaimana masyarakat lokal mengelolaa hutan.

Bagi masyarakat, hutan dan segala isinya bukanlah hanya sekedar komoditi dari segi ekonomi saja, melainkan sebagai bagian dari sistem kehidupan, dimana hutan memiliki nilai magis dan kepercayaan yang mereka pegang teguh. Oleh karena itu pemanfaatan hutan tidak didasari oleh keinginan-keingina eksploitatif tetapi lebih didasarkan pada usaha-usaha memelihara keseimbangan dan kelestarian sumberdaya hutan.

Konsepsi peningkatan peran dan peluang bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan antara lain melalui :

- 1) Penerapan pola kemitraan antara masyarakat, pengusaha kecil, dan pengusaha besar (HPH/HPHTI/BUMN/BUMD) dengan posisi transaksi yang adil dan seimbang. Pengusaha keci, koperasi, atau kelompok masyarakat menjadi sub kontraktor kegiatan perusahaan hutan

(pembibitan, pembukaan lahan, penanaman, dll) sehingga perekonomian terintegrasi sebagai usaha bersama.

- 2) Penciptaan dan pengembangan model-model pemberdayaan ekonomi masyarakat. Model-model tersebut seperti pengembangan hutan rakyat, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pengembangan Kawasan Penyangga (Buffer Zone), PMDH, dll.

5. Ekonomi Kerakyatan

Dalam buku Mubyarto, dkk (2014) terdapat beberapa pengertian sistem ekonomi, yaitu :

- 1) Sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga (pranata) ekonomi yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan acuan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga (*institution*) adalah organisasi atau kaidah ekonomi, baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam mencapai suatu tujuan ekonomi tertentu (Hamid: 2006).
- 2) Setiap kelompok masyarakat (pada tataran yang lebih kompleks membentuk negara bangsa) pasti memiliki sebuah sistem ekonomi, yaitu konsepsi ekonomi suatu negara untuk mengatasi beberapa persoalan, seperti; 1) barang apa yang seharusnya dihasilkan; 2) bagaimana cara menghasilkan barang itu; dan 3) untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Jawaban atas ketiga

pertanyaan tersebut akan menentukan sistem ekonomi sebuah negara (Hudiyanto, 2002).

- 3) Penentuan sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang diyakini oleh negara. Ideologi tertentu akan melahirkan sistem ekonomi tertentu pula karena pada dasarnya, negara melalui ideologinya telah memiliki cara pandang tertentu untuk memandang dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. setiap sistem ekonomi membutuhkan sekumpulan peraturan, ideologi yang mendasarinya, menjelaskan peraturan tersebut dan keyakinan individu yang akan membuatnya terus dijalankan (Robinson, 1962)

a. Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

- 1) Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian (Baswir dalam Mubyarto, 2014).
- 2) Ekonomi kerakyatan adalah tatalaksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat kecil.

b. Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

1) Peranan Vital Negara (Pemerintah).

Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badanbadan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.

2) Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

Tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas

pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

3) Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi).

Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.

4) Pemerataan penguasaan faktor produksi.

Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

5) Koperasi sebagai sokoguru perekonomian.

Dilihat dari sudut Pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.

6) Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh majikan.

Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, "Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama". Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya

kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.

7) Kepemilikan saham oleh pekerja.

Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan harus dikembangkan pada tingkat mikro. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (kooperatif) melalui penerapan polapola Kepemilikan Saham oleh Pekerja. Penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamaan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.

c. Tujuan dan Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan

Bertolak dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut : (1) tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat, (2) terselenggaranya sistem

jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar, (3) terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat, (4) terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat, dan (5) terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

B. Kajian Teori

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori sosiologi lingkungan dan lingkungan yang berpusat pada kehidupan, pertimbangan memilih pendekatan ini karena teori ini memusatkan penelitian atau penjelasan pada hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya. Sosiologi lingkungan terdiri dari dua suku kata, yaitu *sosiologi* dan *lingkungan*. Oleh karena itu untuk lebih memahami paper ini akan kami jelaskan terlebih dahulu pengertian masing-masing sosiologi, lingkungan dan sosiologi lingkungan.

Menurut pendapat ahli sosiologi, *William F.* dan *Meyer F.* dalam Soekanto S. (2012) mengatakan bahwa Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Sedangkan lingkungan, menurut UURI No.4 Tahun 1982 & UURI No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, lingkungan didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam buku sosiologi lingkungan yang kutip oleh Ibrahim M. (2015 : 17) menyatakan bahwa beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain penebangan hutan secara liar, perburuan liar, merusak hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarang tempat, bangunan liar di daerah aliran sungai, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Akibatnya habitat-habitat yang seharusnya diperuntukkan bagi spesies (biota) laut semakin sempit. Padahal, spesies-spesies yang hidup di udara dan darat amat bergantung pada keberadaan hutan mangrove. Akibatnya spesies-spesies tersebut mencari habitat baru yang menambah persoalan manusia.

Olehnya itu perlu kesadaran untuk menjaga hutan karena hutan adalah salah satu bagian dari lingkungan. Pengelolaan hutan yang bersifat kompleks dengan multikomponen dan multiaspek di dalamnya, memerlukan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan sosiologi yang menitikberatkan perhatiannya pada masyarakat, dalam hal ini masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Masyarakat tersebut dipandang sebagai bagian dari ekosistem hutan, sehingga tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pengelolaan hutan.

Teori Lingkungan yang Berpusat pada Kehidupan dalam buku Sosiologi Lingkungan dikutip oleh Dwi Susilo, M.A. (2014) menyatakan bahwa manusia memiliki kewajiban moral terhadap alam. Albert Schweitzer

menyatakan, penghargaan yang harus dilakukan manusia tidak hanya pada diri sendiri saja, tetapi juga kepada semua bentuk kehidupan.

Sementara itu, Paul Taylor menyatakan bahwa terdapat beberapa pokok pilar biosentrisme, yaitu (a) manusia adalah salah satu anggota dari suatu komunitas, sama seperti makhluk hidup lain. Manusia bukan anggota komunitas yang dipandang sebagai segala-galanya, sebab ia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu,derajatnya sama dengan makhluk hidup lain. Manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul daripada makhluk hidup lainnya, (b) spesies manusia bersama spesies lain, membangun sistem yang saling bergantung sedemikian rupa sehingga keberlangsungan dan keberadaan manusia tidak ditentukan oleh lingkungan fisik saja, tetapi juga ditentukan lingkungan biologis (spesies-spesies yang lain), dan (c) semua organisme merupakan pusat kehidupan yang memiliki dunia dan tujuan tersendiri. Ia adalah unik dalam mengejar kepentingannya melalui caranya sendiri. Inilah yang sering dinyatakan sebagai komunitas moral.

Dari gagasan-gagasan di atas karenanya ada kewajiban utama manusia sebagai pelaku (subjek) moral terhadap alam. Sebagai subjek moral, manusia bisa menghormati “moral” alam dengan beragam cara, seperti : *Pertama*, kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan alam dan segala isinya. *Kedua*, kewajiban untuk tidak menghambat kebebasan organisme lain untuk berkembang sesuai dengan hakikatnya. *Ketiga*, kesediaan untuk tidak menjebak, memperdaya, atau menjerat binatang liar.

Menurut Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul: Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk Miskin), ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat. Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: *pertama*, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. *Kedua*, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan.

Adapun Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ciri utama sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, pengusaha, ataupun sebagai tenaga kerja. Tanpa perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan partisifasinya secara aktif dalam

berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memelihara kekayaan alam dan lingkungan hidup. Didalam melaksanakan kegiatan tersebut, semua pihak harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.

2. Sejalan dengan sifat dan ciri pertama, adalah pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang ramah pasar. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKM) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.. Bagi kelompok penduduk yang karena keadaannya mempunyai keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkat kemampuannya dan memberikan dukungan agar dapat memanfaatkannya akses yang terbuka. Dukungan yang mendasar dan secara umum diberikan kepada penduduk miskin, antara lain dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan bagi UKM, termasuk petani dan nelayan kecil, untuk memajukan kemampuan dan usahanya, diberikan berbagai pelatihan serta peningkatan permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna. Langkah langkah yang ramah pasar tersebut diberikan secara selektif, transparan, dan tegas disertai dengan pengawasan yang efektif.
3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya menciptakan pasar

yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. Dengan demikian, misalnya hubungan kemitraan antar usaha besar dan UKM harus berdasarkan kompetensi bukan belas kasihan. Untuk itu, prioritas dilakukan penghapusan praktek-praktek dan perilaku ekonomi diluar aturan permainan yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat seperti praktek monopoli, pengembangan dengan sistem perpajakan progresif dan deregulasi yang diarahkan untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.

4. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan pedesaan, termasuk daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan termasuk daerah terbelakanglainnya harus menjadi prioritas. Hal ini dilakukan antara lain, dengan meningkatkan pembangunan prasarana pedesaan dalam mendukung pengembangan keterkaitan desa-desa sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan.
5. Pemanfatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral. Semuanya harus dikelola secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem sudah barang tentu mempunyai prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan system ekonomi lainnya. Secara umum para

pakar ekonomi belum ada menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

- a. Prinsip kekeluargaan. dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN dan BUMS, BUMD.
- b. Prinsip keadilan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, pengusaha maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama dan gender, semuanya sama dalam lapangan ekonomi.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Kalau selama ini pemerintah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata itu hanya semu belaka. Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada pemerataan pendapatan. Pertumbuhan itu hanya dirasakan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas masyarakat berbeda pada posisi miskin dan melarat.
- d. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak

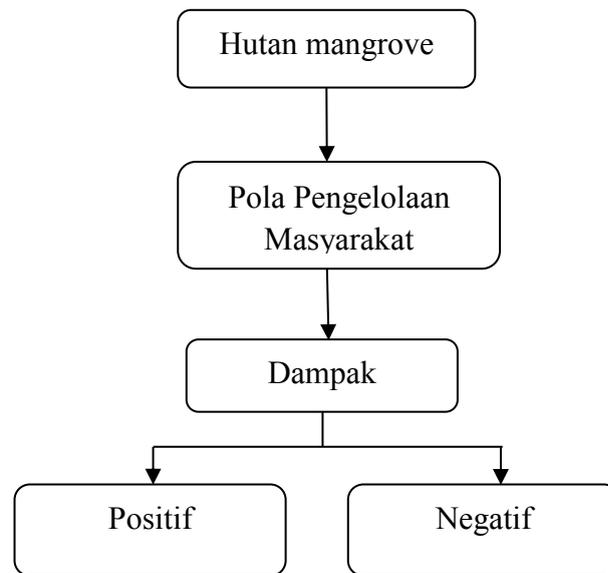
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kepentingan pribadi/individu merupakan hal yang harus mendapat prioritas. Namun kepentingan pribadi/individu tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Untuk menjaga kepentingan masyarakat negara memiliki kompetensi untuk menguasai berbagai cabang produksi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak.

- e. Prinsip kerja sama atau jaringan. Dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama. Dengan kerja sama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar. Kerja sama ini bisa menghimpun para pelaku ekonomi baik produsen, konsumen dan pelaku ekonomi lainnya, baik usaha besar, menengah ataupun kecil. Dengan dukungan informasi dan pembiayaan yang cukup maka UKM akan mampu bangkit dari keterbelakangan.

C. Kerangka Pikir

Kehadiran masyarakat terhadap hutan mangrove dapat berdampak negative maupun positif terhadap pelaksanaan konservasi hutan mangrove. Penelitian ini menganalisis cara masyarakat dalam mengelola dan memberdayakan hutan mangrove serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaan hutan mangrove untuk kebutuhan keseharian masyarakat.

Secara skematis kerangka konsep tersebut dapat di lihat pada ilustrasi I.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Kualitatif yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan, tanpa adanya manipulasi atau rekayasa. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data yang di kumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan bukan angka. Data-data tersebut lebih banyak bercerita mengenai alih fungsi lembaga adat sehingga penelitian dapat tercapai dengan baik.

Studi yang dimaksud adalah strategi riset penelaan (*penelitian*) empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang berdasar pada berbagai sumber. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah identitas. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.

Studi kasus (*case study*) merupakan satu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu atau ikatan tertentu. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk

menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut. Tiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus lainnya. Dalam studi kasus digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumenter, tetapi semuanya difokuskan kearah mendapatkan kesatuan dan kesimpulan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan pada tanggal 18 Desember – 18 Januari yang bertempat di Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan berbagai sumber informasi yang dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa orang yang di anggap bisa memberikan data atau informasi yang benar terhadap masalah yang di teliti. Penentuan informasi penelitian harus teliti dan disesuaikan dengan jenis data atau informasi yang ingin didapatkan, (Pedoman Penulisan Skripsi, 2015:21).

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* atau *judgmental sampling* yaitu penarikan informan yang dilakukan dengan memiliki subjek berdasarkan kriteria spesifik yang di tentukan oleh peneliti,

(Pedoman Penulisan Skripsi, 2015:21). Berikut kriteria informan dan informan penelitian :

- a) Masyarakat Kabupaten Sinjai
- b) Terkhusus di Kecamatan Sinjai Timur
- c) Pemerintah Kabupaten Sinjai

Beberapa kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti, sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan	Umur
		L	P		
1	Sirajuddin	√		Kepala Desa	40
2	Aswar	√		Tokoh Masyarakat	30
3	Tahir		√	Wiraswasta	35
4	Hj. Hasma		√	Wiraswasta	45
5	Rostina		√	Wiraswasta	50
6	Irmawati		√	Wiraswasta	35
7	Diana		√	Wiraswasta	30

Tabel 3.1. Kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti.

D. Fokus Penelitian

Spradley dalam Sugiono (2013:286) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang dalam situasi social. Dengan demikian penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk menegaskan dan memastikan hal tersebut, peneliti mengambil informasi dari informan yang diambil sebagai sampel. Pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti ini didasarkan pada objektivitas data yang nantinya akan dijadikan peneliti sebagai dasar dalam penelitian Wisata Mangrove di Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

E. Instrumen Penelitian

Menurut Sukmadinata dalam Muqarrobil (2014) Instrumen penelitian adalah berupa tes yang bersifat mengukur, karena berisi tentang pertanyaan dan pernyataan yang alternative jawabannya memiliki standar jawaban tertentu, benar salah maupun skala jawaban. Instrumen yang berisi jawaban skala, berupa pertanyaan dan pernyataan yang jawabannya berbentuk skala deskriptif ataupun skala garis. Selain itu, untuk mendukung tercapainya hasil penelitian maka peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, dokumentasi (kamera).

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Menurut Umar dalam Pelu (2009), data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau in-depth interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono dalam Pelu (2009), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, penelitian misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dilakukan periset untuk mendapatkan data yang mendukung penelitiannya. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni:

1. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Supardi dalam Lestari, 2015). Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali lagi oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Supardi dalam Lestari, 2015).

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informasi agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.

Wawancara mendalam biasa juga disebut dengan wawancara semi-struktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Informan yang akan diteliti menggunakan teknik wawancara mendalam adalah masyarakat dilokasi penelitian. Sementara data yang ingin diperoleh dari wawancara yakni tentang pola penguasaan ruang wisata mangrove dalam mendorong ekonomi masyarakat lokal dan dampak ekonomi wisata mangrove di Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berbentuk foto, video, dan catatan lainnya yang berkaitan dengan pola penguasaan ruang wisata mangrove dalam mendorong ekonomi masyarakat lokal dan dampak ekonomi wisata mangrove di Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Bahkan tidak menutup kemungkinan, penulis juga mencari data dokumen melalui internet yang tetap memperhatikan kebenaran informasinya.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution, dalam Samiun (2015). Pengertian analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusub data berarti

bahwa menggolongkannya di dalam pola atau tema. Tafsiran atau Interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori atau pola, serta mencari hubungan antara berbagai konsep. Analisis dari penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Data *reduction* (Reduksi data), memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita, kemudian mencari temanya. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi kata juga dapat membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Data *Display* (penyajian Data), setelah melakukan reduksi data, peneliti selanjutnya melakukan tahap ke dua yakni penyajian data dimana data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan ke dalam suatu bentuk tabel.
3. *Conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan/verifikasi) setelah penyajian data, peneliti kemudian menginterpretasi atau menyimpulkan data-data atau informasi yang telah di reduksi dan di sajikan.

I. Etika Penelitian

Adapun etika dalam penelitian menurut Somantri (Somantri, 2006:45) adalah sebagai berikut :

1. Memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti.

2. Peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Dengan demikian, peneliti harus menyampaikan tujuan dari penelitian kepada subjek dengan jelas.
3. Informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan, dan jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk penelitian, maka penyampaiannya harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada responden, dan memberikan alasan spesifik mengapa informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.
4. Apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar
5. Tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei dan responden yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati.
6. Dalam studi lab, subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi.
7. Subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka, baik secara fisik maupun mental.
8. Tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. History Wilayah

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Ekosistem mangrove yang menjadi pokok perhatian dalam *paper* ini adalah kawasan hutan mangrove di daerah Tongke-tongke yang berada di pulau Sulawesi. Tongke-tongke adalah sebuah desa yang berada pada bagian Barat teluk Bone. Lokasi ini dilalui oleh dua buah sungai yaitu sungai Baringeng dan sungai Tui, yang membawa sedimen dari gunung Bawakaraeng hingga ke pesisir pantai, sehingga tanah yang berada pada kawasan tersebut merupakan campuran antara pasir dan lumpur sungai.

Secara administratif dusun Tongke-tongke merupakan bagian dari sebuah desa Samataring yang berada pada kecamatan Sinjai Timur, kabupaten Sinjai yang berjarak sekitar 20 km dari Balangnipa (ibukota kabupaten Sinjai) yang dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam waktu 30 menit. Daerah yang memiliki luas 2,25 km², secara umum merupakan kawasan konservasi hutan Mangrove dan daerah pertanian.

Tongke-tongke mempunyai populasi penduduk sekitar 1.809 orang yang dapat dibagi atas 2 (dua) golongan, golongan pertama adalah penduduk lokal yang kebanyakan adalah petani sawah dan palawija, sedangkan golongan kedua adalah pendatang yang umumnya adalah nelayan.

Sebagian besar pendatang berasal dari daerah Mare kabupaten Bone yang memiliki keahlian dalam penangkapan ikan tuna dan pencarian terumbu karang (*coral reef*) yang oleh masyarakat ini disebut dengan “*taka-taka*”. Pendatang inilah yang kemudian mengolah kawasan hutan mangrove menjadi empang-empang. Selain itu, mereka juga menanam kembali kawasan mangrove tersebut.

Penanaman berbagai jenis varietas tanaman juga banyak di jumpai di sekitar rumah-rumah penduduk seperti, kelapa, pisang, mangga, pepaya, dan bibit mangrove. Keberadaan tanaman ini, menjadikan di halaman di sekitar rumah penduduk Nampak sehat, asri, teratur, indah dan nyaman. Selain menanam berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, para penduduk juga banyak memelihara hewan seperti ayam, itik, dan ikan.

Pola pemukiman penduduk kecamatan tongke-tongke merupakan perkampungan dengan kumpulan bangunan tempat tinggal yang umumnya berjajar memanjang mengikuti pinggiran jalan dan di ataur secara berkelompok dalam posisi saling berhadapan satu sama lain. Demikian pula daerah empang penduduk berada di bagian belakang rumah pemukiman penduduk. Bentuk rumah penduduk awal mulahnya rumah panggung, dinding dan lantainya terbuat dari papan dan atapnya terbuat dari seng, keadaan rumah tertata rapih, di mana terdapat teras, ruang tamu, ruang tengah, dan ruang dapur. Tidak ketinggalan pula setiap rumah sudah memiliki ventilasi yang cukup sebagai tempat keluar masuknya udara.

Keadaan Kecamatan Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai ini merupakan daerah yang masih sangat asri di desa ini masih sangat tenang selain karena belum banyaknya kendaraan umum yang lalu lalang sehingga jauh dari kebisingan seperti kota. Selain itu Kecamatan Tongke-Tongke merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai penani mangrove yang setiap hari hamper sebagian waktunya mereka menghabiskan di sawah di mana para petani mangrove tersebut berangkat kesawahnya pada pagi hari dan baru pulang sebelum duhur, dan lanjut lagi sampai matahari akan tenggelam.

2. Batas Wilayah Tempat Penelitian

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

3. Sejarah Kabupaten Sinjai

Sinjai adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nama Sinjai berasal dari Kata Sijai' (Bahasa Bugis) artinya sama jahitannya. Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari LAMASSIAJENG Raja Lamatti X untuk memperkokoh bersatunya antara kerajaan Bulo-Bulo dan Lamatti dengan ungkapannya "PASIJA SINGKERUNNA LAMATI BULO-BULO" artinya satukan keyakinan Lamatti dengan Bulo-Bulo, sehingga setelah meninggal dunia beliau digelar dengan PUANTA MATINROE RISIJAINA. Eksistensi dan identitas

kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai pada masa lalu semakin jelas dengan didirikannya Benteng pada tahun 1557. Benteng ini dikenal dengan nama Benteng Balangnipa, sebab didirikan di Balangnipa yang sekarang menjadi Ibukota Kabupaten Sinjai. Disamping itu, benteng ini pun dikenal dengan nama Benteng Tellulimpoe, karena didirikan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) kerajaan yakni Lamatti, Bulo-bulo, dan Tondong lalu dipugar oleh Belanda melalui perang Manggarabombang. Agresi Belanda tahun 1559 – 1561 terjadi pertempuran yang hebat sehingga dalam sejarah dikenal nama Rumpa'na Manggarabombang atau perang Mangarabombang, dan tahun 1559 Benteng Balangnipa jatuh ke tangan Belanda. Tahun 1636 orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-kerajaan di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba menentang keras upaya Belanda untuk memecah belah persatuan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba membujuk Kerajaan Bulo-bulo untuk melakukan peran terhadap kerajaan Gowa.

Peristiwa ini terjadi tahun 1639. Hal ini disebabkan oleh rakyat Sinjai tetap perpegan teguh pada PERJANJIAN TOPEKKONG. Tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda VAN DER CAPELLAN datang dari Batavia untuk membujuk I CELLA ARUNG (PUANG CELLA MATA) Bulo-Bulo XXI agar menerima perjanjian Bongaya dan mengisinkan Belanda Mendirikan Loji atau Kantor Dagang di Lappa tetapi

ditolah dengan tegas. Tahun 1861 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, takluknya wilayah Tellulimpoe Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan dengan sebutan Goster Districten. Tanggal 24 pebruari 1940, Gubernur Grote Gost menetapkan pembangian administratif untuk daerah timur termasuk residensi Celebes, dimana Sinjai bersama-sama beberapa kabupaten lainnya berstatus sebagai Onther Afdeling Sinnai terdiri dari beberapa adats Gemenchap, yaitu Cost Bulo-bulo, Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Bulo-bulo, Manipi dan Turungeng. Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan dan namanya ditatah sesuai dengan kebutuhan Bala Tentara Jepang yang bermarkas di Gojeng. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 Oktober 1959 Sinjai resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959.

Kabupaten Sinjai berdasarkan penelusuran sejarah, dimulai dari pemukiman pertama di WAWO BULU Manipi Kecamatan Sinjai Barat di sebelah timur Malino dipimpin oleh orang yang digelar PUATTA TIMPAE' TANA atau TO PASAJA yaitu Arung Manurung Tanralili. Keturunan Arung Tanralili, salah seorang diantaranya adalah wanita yang kemudian puteri Tanralili inilah yang mengembangkan wilayah Wawo Bulu menjadi Kerajaan TURUNGENG. Raja wanita tersebut diperisterikan oleh putera Raja Tallo yang kemudian salah seorang turunannya adalah wanita kawin dengan salah seorang putera Raja Bone. Dari hasil perkawinan itulah yang kemudian melahirkan enam orang putera dan satu orang puteri. Akan tetapi

puterinyalah yang menggantikan ibunya menduduki tahta kerajaan di Turungeng. Adapun keenam puteranya ditebarkan ke wilayah lain sehingga ada yang bermukim di Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka, Bala Suka dan masing-masing berusaha membentuk wilayah kekuasaan. Dari keturunan Puatta Timpae' Tana atau To Pasaja inilah yang berhasil membentuk kerajaan dalam wilayah dekat pantai yang dikenal dengan kerajaan Tondong, Bulu-Bulu, dan Lamatti. Untuk memelihara hubungan dan keutuhan wilayah kerajaan yang bersumber dari satu keturunan, maka muncullah gagasan dari I Topacebba (anak dari La Padenring) yang digelar Lamassiajingeng (Raja Lamatti ke-X) berupaya mempererat hubungan Lamatti dengan Bulu-Bulu atas dasar semboyan “ PASIJAI SINGKERUNNA LAMATTI BULO-BULO “ artinya satukan keyakinan / kekuatan Lamatti dengan Bulu-Bulu. Penggagas dalam memelihara persatuan Lamatti dan Bulu-Bulu saat meninggalnya digelar “ PUATTA MATINROE' RISIJAINNA “. Sinjai dalam ungkapan bahasa Bugis bermakna satu jahitan. Sinjai artinya bersatu dalam jahitan. Dari istilah sijai menjadi sinjai, merupakan suatu simbol dalam mempererat hubungan kekeluargaan, menurut bahasa Bugis. Dari pertumbuhan dan perkembangan kerajaan yang ada, muncul pemikiran baru tentang perlunya memperkuat persatuan dan kesatuan dalam memelihara dan melindungi kerajaan yang ada, maka dibentuklah kelompok gabungan kerajaan yang berbentuk vederasi yang dikenal dengan:

1. TELLU LIMPOE', merupakan persekutuan kerajaan yang berdekatan dengan pantai, yaitu Tondong, Bulo-Bulo, dan Lamatti.
2. PITU LIMPOE', merupakan persekutuan kerajaan yang berlokasi di daerah dataran tinggi , yaitu kerajaan Turungeng, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka, Balasuka.

Federasi kerajaan Tellu Limpoe' dan Pitu Limpoe' merupakan dua kekuatan yang akan membendung arus ekspansi dari barat dan selatan, juga merupakan kekuatan pertahanan untuk membendung arus ekspansi dari utara dan penyelamatan garis pantai.

4. Bupati Sinjai Dari Masa ke masa

Di bawah pemerintahan Daerah Swatantra Bonthain maka yang mewakili Kewedanaan Sinjai sebagai anggota DPR ialah St. Marwah Sulaiman dan M. Syurkati Said, dan A. Muh. Saleh. Konon wakil dari kewedanaan Sinjai cukup berpengaruh, karena St. Marwah Sulaiman dalam sejarahnya pernah membubarkan rapat DPR Bonthain karena terjadi perbedaan prinsip.

- a. Andi Abd. Latief 1960 – 1963
- b. Andi Azikin 1963 – 1967
- c. Drs. H. M. Nur Tahir 1967 – 1971
- d. Drs. H. A. Bintang M. 1971 – 1983
- e. H. A. Arifuddin Mattotorang SH. 1983 – 1993
- f. H. Moh. Roem SH. Msi. 1993 - 2003
- g. Andi Rudyanto Asapa, SH, LLM (2003 - 2013)

h. H. Sabirin Yahya, S.Sos (2013- Sekarang)

5. Wilayah Kabupaten Sinjai

- a. Kecamatan Sinjai Utara, 6 kelurahan
- b. Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 12 desa
- c. Kecamatan Sinjai Tengah, 1 kelurahan dan 10 desa
- d. Kecamatan Sinjai Barat, 1 kelurahan dan 8 desa
- e. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan dan 10 desa
- f. Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan dan 7 desa
- g. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa
- h. Kecamatan Tellu Limpoe, 1 kelurahan dan 10 desa
- i. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah kepulauan.

(Sumber profil Desa Tongke-Tongke).

6. Tempat atau Icon Kabupaten Sinjai

- a. Pulau Sembilan

Pulau sembilan yang mempunyai pulau-pulau kecil sebanyak sembilan. Atas dasar itu makanya disebut sebagai Pulau Sembilan. Pulau yang terdiri dari Pulau Burungloe, Pulau Liang-liang, Pulau Kambuno, Pulau Kodingareng, Pulau Batanglampe, Pulau Katingdoang, Pulau Kanalo 1, Pulau Kanalo 2 dan Pulau Larea-rea. Meski Pulau Sembilan belum setenar dengan Kepulauan Spermonde namun pulau Sembilan menawarkan keindahan yang tak kalah menariknya. Dari ke-sembilan pulau tersebut, ada satu pulau yang tak berpenghuni dan sangat menarik untuk dikunjungi. Pulau ini bernama

Larea-rea. Larea-rea sebuah pulau kecil yang di tengahnya ada bukit karang ditumbuhi pohon-pohon. Bukit tersebut dikelilingi hamparan pasir putih. Sepintas, pulau ini mirip dengan bukit karang yang ada di tanah lot.

b. Taman Purbakala Batupake Gojeng

Destinasi wisata yang jaraknya paling dekat dari pusat kota Sinjai adalah Taman Purbakala Batupake Gojeng. Taman purbakala ini berada di atas bukit dengan ketinggian sekira 125 meter dari permukaan laut. Taman yang luas dipenuhi dengan pepohonan yang rindang.

Yang tak kalah menarik dari Batupake Gojeng adalah pemandangannya. Dari atas bukit, akan terlihat jelas kepulauan sembilan dengan jejeran pulau-pulau kecilnya. Juga akan tampak jelas air lautnya yang biru berpadu dengan warnanya birunya langit. Sungguh pemandangan yang sangat menawan. Saban hari taman ini selalu ramai dikunjungi meski hanya sekadar menikmati semilir angin sepoi-sepoi. Untuk masuk ke sini hanya dikenai tiket masuk sebesar Rp. 2.500,-

c. Kawasan Benteng Balangnipa

Sinjai banyak menyimpan cerita tentang zaman penjajahan di masa lampau. Sinjai punya destinasi wisata sejarah yang layak untuk dikunjungi yaitu Benteng Balangnipa. Benteng ini didirikan pada tahun 1557 oleh kerajaan Bulu-Bulo, kerajaan Tondong dan kerajaan Lamatti. 3 kerajaan ini disebut juga dengan kerajaan Tellulimpoe.

Benteng ini dahulu hanya terbuat dari batu gunung yang kemudian ditempel dengan lumpur dari sungai Tangka. Meski hanya terbuat dari bahan yang sangat sederhana, namun benteng Balangnipa merupakan salah satu benteng terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Selain dijadikan sebagai benteng pertahanan, pun difungsikan sebagai pusat administrasi oleh kerajaan Tellulimpoe. Juga kerap dijadikan sebagai pusat persinggahan oleh petinggi-petinggi kerajaan Gowa

d. Rumah Adat Karampuang

Karampuang nama sebuah kampung di Kecamatan Bulupoddo. Berjarak sekira 40 km dari pusat kota Sinjai. Sebuah kampung yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Rumah adat itu terletak di tengah bukit berbatu. Jauh dari kehidupan masyarakat modern.

Komunitas adat ini memiliki ritual yang selalu dirayakan setiap tahunnya yang populer dengan ritual Mappogau Sihanua. Mappogau Sihanua merupakan ritual tahunan yang digelar se usai panen, yaitu pada rentang bulan Oktober dan November.

Hal menarik lainnya, di kawasan adat Karampuang berdiri 2 rumah yang dijadikan ikon dari perkampungan ini. Para tetua adat yang menempati rumah tersebut. Mereka inilah yang memegang peranan dalam melestarikan budaya-budaya dalam kawasan adat tersebut. (Sumber : Irhapunya.net)

B. Informan Penelitian

Informan alam penelitian ini adalah Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat kabupaten Sinjai Timur yang dipilih berdasarkan kriteria spesifik informan yang telah ditentukan, yaitu : (a) Masyarakat Kabupaten Sinjai, (b) Terkhusus di Kecamatan Sinjai Timur, dan (c) Pemerintah Kabupaten Sinjai. Adapun informan yang dipilih adalah mereka yang aktif di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai Timur, termasuk aktif dalam pengurusan Wisata Mangrove sehingga dapat memberikan informasi yang valid dan memadai mengenai kondisi dan keberadaan Wisata Mangrove itu sendiri khususnya yang menyangkut masalah penelitian. Alasan memilih informan berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditentukan adalah untuk menjangkau informasi secara komprehensif mengenai kondisi Wisata Mangrove tersebut. Ada 5 informan terpilih yang aktif terhadap kepengurusan Wisata Mangrove. Untuk mendapatkan gambaran mengenai informan dalam penelitian ini maka berikut ini akan diuraikan mengenai identitas dari informan yang dipilih.

NO	NAMA	PEKERJAAN	UMUR
1.	Sirajuddin	Kepala Desa	40
2.	Aswar	Tokoh Masyarakat	30
3.	Tahir	Wiraswasta	35
4.	Hj. Hasma	Wiraswasta	45
5.	Rostina	Wiraswasta	50

6.	Irmawati	Wiraswasta	35
7.	Diana	Wiraswasta	30

Tabel 4.1. Identitas informan penelitian.

1. SIRAJUDDIN

adalah Kepala Desa Tongke-Tongke yang menjabat pada periode 2017-2022. Beliau lah yang menghimbau kepada masyarakat dan seluruh pengunjung Wisata Mangrove agar menjaga kebersihan lokasi wisata. Selain itu beliau juga memilih beberapa orang/masyarakat yang ditugaskan mengurus loket pembayaran karcis dan tempat parkir agar dana yang dihasilkan dapat digunakan untuk perluasan Wisata Mangrove.

2. ASWAR

adalah tokoh masyarakat ‘Aku Cinta Indonesia’ (ACI). Pada tahun 1988 kelompok tani ACI di Tongke-tongke dibakukan dengan nama Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam – Aku Cinta Indonesia (KPSA–ACI) melalui program pembinaan kelembagaan dan penyuluhan dari instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Beliau juga membantu ekonomi masyarakat dengan memberikan lapangan kerja seperti kafe terapung di Wisata Mangrove.

3. TAHIR

adalah pengelola wahana speedboat yang ada di hutan mangrove. Dia adalah salah seorang yang dipilih serta diberikan tanggungjawab oleh pihak pengelola wisata mangrove Desa Tongke-Tongke untuk mengelola wahana speedboat tersebut. Jadi, ketika ada pengunjung yang ingin mencoba

wahana speedboat maka bayarannya pun langsung kepada Pak Tahir selaku penanggungjawab wahana.

4. IRMAWATI dan Hj. HASMA

adalah pemilik kafe-kafe apung di wisata mangrove Tongke-Tongke. Merekalah yang berinisiatif untuk mendekorasi sedemikian rupa kafe apung yang telah disediakan oleh pengelola wisata mangrove tersebut. Tujuannya adalah agar menarik perhatian pengunjung untuk datang ke kafe apung sambil menikmati pemandangan yang ada di kawasan wisata mangrove.

5. ROSTINA dan DIANA

adalah Pedagang Kaki Lima yang juga berjualan di wisata mangrove Desa Tongke-Tongke. Mereka juga menyediakan beberapa motif kerang-kerang yang menarik sehingga juga menarik minat pengunjung yang datang. Itulah yang membedakan jualan mereka dengan jualan yang ada di kafe apung. Mereka mampu melihat peluang yang ada dengan bersaing secara sehat tanpa merugikan pedagang-pedangan lain yang menjual atau memiliki usaha di kawasan mangrove tersebut.

BAB V

POLA PENGUASAAN RUANG WISATA MANGROVE DALAM MENDORONG EKONOMI MASYARAKAT LOKAL

A. Hasil Penelitian

Setelah peneliti melakukan observasi di kawasan hutan mangrove yang berada di kabupaten Sinjai, yang peneliti dapatkan adalah wisata mangrove salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat kabupaten Sinjai maupun dari luar kota. Wisata mangrove banyak dikunjungi karena hutan bakau yang indah. Selain itu wisata mangrove mempunyai 2 kafe apung, dimana kafe apung sebagai tempat peristirahatan pengunjung yang menyajikan berbagai jenis minuman dan makanan.

Selain kafe apung juga terdapat beberapa Pedagang Kaki Lima yang juga menjual beberapa jenis kerang-kerang-an yang tidak ada dijual di kafe apung. Wisata mangrove Desa Tongke-Tongke juga memiliki satu wahana yaitu wahana speedboat yang digunakan pengunjung untuk melihat-lihat langsung sekitar kawasan bakau yang ada di wisata mangrove tersebut.

Salah satu pemanfaatan ruang yang ada di kawasan wisata mangrove Desa Tongke-Tongke adalah penyediaan lahan (lapangan kerja) kepada masyarakat Sinjai Timur seperti lahan untuk pembangunan kafe apung, Pedagang Kaki Lima, dan juga lahan untuk wahana speedboat. Seperti yang dijelaskan Irmawati, salah seorang pengelola lahan di wisata mangrove yang mengatakan bahwa :

“Seperti yang adek lihat disini, ada beberapa kafe apung, Pedagang Kaki Lima juga, bahkan ada speedboat. Itu semua yang memberikan lahan adalah pengelola wisata mangrove ini. Kita-kita disini cuma

melengkapi, maksudnya itu kita-kita disini hanya memberikan isi jual-jualan seperti minuman, makanan ringan, kerang-kerang-an. Kita disini yang renovasi tempat sesuai keinginan yang punya usaha. Tetapi yang memberikan lahan tetap dari pengelola wisata ini” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Senada dengan hasil wawancara di atas, salah satu pengelola wahana speedboat yang bernama Tahir mengatakan bahwa :

“Iya saya kan ceritanya disini cuma sebagai pengelola wahana speedboat ini, nah yang menyediakan speedboat ini itu sebenarnya pemerintah. Speedboat ini langsung diberikan dengan cuma-cuma oleh Menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi Puji Astuti kepada organisasi Aku Cinta Indonesia (ACI) yang juga membantu mengelola wisata ini. Terus wahana ini alhamdulillah saya dan teman saya yang satu itu yang diberikan tanggung jawab untuk mengelolanya. Jadi kan bisa menambah penghasilan juga” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa wisata mangrove ini memberikan ruang kepada masyarakat Sinjai Timur yang berada di Desa Tongke-Tongke. Ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan ruang wisata mangrove yang dapat mendorong ekonomi masyarakat lokal yang ada di sekitar wisata. Pengelolaan hutan mangrove pada dasarnya dilakukan penanaman berdasarkan potensi yang ada, membentuk kawasan hutan lindung mangrove yang tidak dapat diganggu, lebih meningkatkan peran organisasi masyarakat dan lebih memberdayakan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penebangan mangrove, perlu sentuhan teknologi dalam pengembangan mangrove, masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan tentang mangrove serta peningkatan peran pemerintah, penyuluhan tentang lingkungan dan ekosistem mangrove, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan mangrove, peningkatan pendidikan/pelatihan kepada masyarakat, serta menumbuhkan musyawarah

antara masyarakat dan pemerintah tentang pemanfaatan dan pengelolaan mangrove, sosialisasi penerapan peraturan pemerintah tentang lingkungan, melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan mangrove, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendukung pengelolaan mangrove, peningkatan penanaman mangrove di sekitar pantai. Wisata mangrove menyediakan lahan, dan masyarakat lah yang menggunakan peluang kerja tersebut.

Salah satu responden yang bernama Hj. Hasma mengatakan bahwa :

“Kalau masalah pengurusan membangun kafe-kafe di kawasan wisata mangrove ini kita hanya berurusan dengan organisasi ACI karena mereka lah selain Kepala Desa yang juga turun tangan langsung mengelola wisata ini. Dalam membangun tempat di sini itu kami tidak pernah bayar sewa atau uang apa saja. Sampai sekarang kami tidak pernah bayar uang pembangunan. Rata-rata yang mengelolah atau membangun tempat di sini itu masyarakat setempat, tidak ada masyarakat luar yang mengelolah wisata ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti memberikan simpulan bahwa indikator dalam pengurusan Izin Membangun Bangunan (IMB) adalah langsung kepada pengelola dan penanggungjawab wisata mangrove Desa Tongke-Tongke yaitu organisasi ACI. Organisasi ACI ini adalah organisasi yang bekerjasama langsung dengan Menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi Puji Astuti.

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak tempat-tempat wisata yang jika kita ingin membangun sebuah usaha di dalamnya maka kita harus mengurus segala sesuatunya, salah satunya yaitu mengenai pembayaran peminjaman lokasi usaha. Namun, wisata mangrove di Desa Tongke-Tongke

Sinjai Timur ini tidak memungut biaya sepeser pun mengenai biaya lokasi usaha, masyarakat hanya menanggung apa yang memang mereka ingin jual.

Dalam pengelolaan ruang wisata mangrove Desa Tongke-Tongke pengelola dan pemilik usaha yang berada di kawasan wisata mangrove menghadapi permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan pemanfaatan ruang di kawasan wisata tersebut. Permasalahan-permasalahan itu adalah sebagai berikut :

1. Sampah

Sampah adalah permasalahan yang sangat dikeluhkan oleh pengelola dan pemilik usaha di wisata mangrove. Kadangkala mereka menemukan beberapa sampah di setiap sudut jalan dan itu sangat mengganggu pemandangan bahkan bisa mengganggu kenyamanan pengunjung atau wisatawan yang datang ke wisata mangrove tersebut.

Sampah juga bisa menyebabkan pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem ikan yang dimana spesies ini juga merupakan salah satu daya tarik pengunjung. Sebagaimana yang dikatakan salah satu responden yang bernama Rostina bahwa :

“Wah kalau berbicara tentang masalah, rata-rata kami disini sebagai pemilik usaha yah sangat terganggu dengan adanya sampah yang berserakan di beberapa tempat. Masalahnya itu juga berdampak pada penghasilan kami karena jika sampah banyak yang berserakan kan pengunjung pasti juga bakalan berkurang karena pasti mereka akan berpandangan kalau tempat ini tidak terlalu terurus, tapi sebenarnya sih semuanya juga karena ulah pengunjung juga, tapi alhamdulillah masalah ini sudah diatasi oleh pengelola wisata ini” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Salah seorang responden yang bernama Aswar yang merupakan anggota organisasi ACI juga menambahkan bahwa :

“Sampah dek, itu sangat mengganggu sekali. Tapi ACI dan Kepala Desa sudah melakukan pergerakan jadi alhamdulillah masalah sampah ini sudah teratasi. Sudah disediakan beberapa tong sampah di setiap sudut jalan, baliho dan poster-poster besar, kata-kata bijak tentang kebersihan. Program-program ini sangat membantu sekali baik untuk pemilik usaha maupun untuk pengunjung yang datang” (Hasil wawancara pada tanggal 28 Desember 2017)

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti mengemukakan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi pengelola maupun pemilik usaha yang ada di kawasan wisata mangrove adalah masalah sampah yang berserakan di beberapa tempat. Penyebab utama banyaknya sampah yang berserakan sebenarnya adalah ulah pengunjung sendiri yang tidak menjaga kebersihan di kawasan wisata mangrove.

Adapun program yang dilakukan para pengelola dan penanggungjawab wisata mangrove ini yaitu dari organisasi ACI yang bekerjasama dengan Kepala Desa Tongke-Tongke yaitu pemberadaan beberapa tong sampah yang disediakan di beberapa sudut tempat. Tidak hanya itu, beberapa papan-papan bertuliskan kata-kata bijak tentang kebersihan, baliho dan poster-poster yang berukuran besar juga didirikan dengan kokohnya. Hasil dari program ini pun sangat baik karena semenjak pemberdayaan program tersebut kawasan wisata mangrove sudah terlihat jelas kebersihannya.

2. Abrasi

Abrasi merupakan permasalahan selanjutnya yang dihadapi pengelola dan pemilik usaha yang ada di kawasan wisata mangrove Desa Tongke-Tongke. Ini juga memiliki hubungan dengan permasalahan pertama karena ketika angin kencang maka obak pun angin pasang dan ketika banyak sampah yang berserakan itu sangat bahaya terhadap pengelolaan kawasan wisata mangrove.

Tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada musim dimana terjadi hujan yang berkepanjangan, pasanganya air laut, angin kencang. Kita tidak bisa menghindari cuaca yang terjadi. Namun, ada baiknya ketika pengelola atau penanggungjawab memang betul-betul memikirkan program yang dapat mengatasi masalah tersebut.

Kepala Desa Tongke-Tongke yang bernama Sirajuddin memaparkan bahwa :

“Masalah yang lainnya itu selain sampah adalah abrasi. Kalau cuaca buruk itu juga bisa berpengaruh buruk terhadap kawasan di wisata mangrove Desa Tongke-Tongke. Maka, saya selaku Kepala Desa mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota ACI untuk memikirkan solusi dari masalah abrasi ini. Ternyata masalah ini juga menarik perhatian dari pemerintah. Nah jadilah pemerintah dalam artian Menteri Perikanan dan Kelautan memutuskan untuk membangun tembok penahan gelombang dan alhamdulillah memang sangat menolong” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2018)

Salah seorang responden yang bernama Irmawati yang merupakan juga menambahkan bahwa :

“Kalau saya sebenarnya lebih khawatir masalah abrasi karena kalau ombak naik otomatis kan kafe saya juga kemasukan air laut, barang-barang pun harus diamankan, pokoknya harus serba siaga

untuk mengamankan kafe saya. Belum lagi kursi-kursi yang mudah terkena angin dan ombak sedikit saja sudah bergeser. Maklum lah dek di kafe saya ini cuma disediakan kursi plastik. Kadang juga saya berpikir untuk tidak buka kafe dulu karena yah begitu banyak yang dikhawatirkan. Harapan saya sih semoga pengunjung tidak bosan dan tidak takut datang karena masalah ini, lagipula kan pengelola juga sudah bertindak menangani masalah yang ada” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Dari hasil wawancara di atas bersama dengan Kepala Desa Tongke-Tongke maka peneliti menyimpulkan bahwa masalah kedua yang meresahkan pengelola dan pemilik usaha yang ada di kawasan wisata mangrove adalah abrasi. Namun, pengelola dan pemerintah sangat gesit dalam menangani masalah tersebut. Ini dibuktikan dengan adanya program pembangunan tembok penahan gelombang. Semenjak dibangunnya tembok tersebut masyarakat yang membangun usaha di dalam wisata mangrove merasa sangat terbantu. Mereka tidak lagi terlalu resah dan khawatir ketika angin kencang dan pasang air laut terjadi.

Berbagai harapan pemilik usaha pun diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan peneliti, antaranya yaitu mereka berharap semoga pengunjung atau wisatawan tidak akan bosan dan takut datang ketika terjadi pasang air laut karena bagi mereka pengunjung itu sangat berarti karena tanpa pengunjung maka jualan mereka tidak akan laku sehingga pemilik usaha merasa terbantu dengan tidak hentinya perhatian dan kontrol dari pemerintah dan pengelola wisata mangrove itu sendiri.

Pola penguasaan wisata mangrove ini sangat mendorong ekonomi masyarakat lokal di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai karena disediakannya lahan dari pemerintah dan

pengelola-pengelola wisata mangrove tersebut. Pemerintah yang selalu merespon perkembangan wisata mangrove dengan berbagai program yang dijalankan dalam menangani masalah-masalah yang ada. Selama wisata mangrove ini terkendali dengan baik maka ekonomi masyarakat pun juga akan baik-baik saja.

B. Pembahasan

Hutan mangrove di Kabupaten Sinjai berkembang dari partisipasi pemerintahan, komunitas ACI, dan masyarakat. Masyarakat pesisir Kabupaten Sinjai melakukan pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove dari tahun ke tahun sampai sekarang. Keberhasilan pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai membawa berbagai pihak (Instansi/lembaga pemerintah dan swasta, akademisi, dll), baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri berkunjung ke Sinjai. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sinjai, termasuk dari segi penghasilan atau ekonomi masyarakat yang berada di sekitar Wisata Mangrove.

Pengelolaan Wisata Mangrove memiliki beberapa tujuan nyata sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kedua, meningkatkan kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Ketiga, meningkatkan peran dan tanggung jawab PT. Perhutani, masyarakat desa dan pihak yang berkepentingan. Keempat, meningkatkan mutu dan sumberdaya hutan. Kelima, meningkatkan produktivitas dan keamanan hutan. Keenam,

menciptakan lapangan kerja. Ketujuh, meningkatkan kesempatan berusaha. Kedelapan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.

Obyek wisata mangrove ini telah ditetapkan sebagai laboratorium mangrove Sulawesi Selatan, sekaligus ikon wisata andalan Sinjai. Pengunjung bisa merasakan sensasi menyusuri hutan bakau yang luas dengan berkeliling menapaki jembatan kayu selebar jalan setapak yang mengitari area hutan bakau.

Anjungan atau dermaga kayu yang terdapat di tempat ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung melakukan foto dengan latar hutan bakau. Selain itu, pengunjung bisa menyusuri kawasan hutan dengan menggunakan perahu. Perahu yang peneliti maksudkan disini adalah wahana speedboat. Wahana ini bisa memuat maksimal 6 orang. Dari sinilah wisata hutan mangrove memberikan manfaat bagi pemilik atau penanggungjawab speedboat dari segi ekonominya.

Ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu penanggungjawab wahana terbilang meningkat semenjak adanya wisata hutan mangrove tersebut karena dapat kita lihat bahwa wahana speedboat yang disediakan pemerintah untuk kemudian diambil alih oleh masyarakat penduduk Desa Tongke-Tongke sangat menunjang ekonomi mereka. Ini disebabkan pengunjung yang ingin berkeliling melihat kawasan hutan mangrove yang mengelilingi wisata tersebut membayar jasa speedboat.

Selain itu hal yang menguntungkan lain adalah jarak destinasi wisata mangrove yang terletak di Desa Tongke-Tongke dari pusat kota Kabupaten

Sinjai sekitar 8 kilometer dan bisa ditempuh kendaraan darat dengan waktu tempuh sekitar 15 menit saja. Menuju ke lokasi ini kita tidak perlu takut jalanan rusak karena jalanannya mulus sampai ke pesisir, asyiknya lagi kita juga melewati perkampungan nelayan dengan jejeran berbagai jenis perahu bersandar di pelabuhan.

Untuk menikmati keindahan hutan mangrove Desa Tongke - Tongke, pengunjung cukup membayar uang tiket Rp 5000 dan Rp 2000 parkir, lalu dari area parkir pengunjung harus berjalan menyusuri jembatan kayu ulin yang membentuk lorong-lorong dan saling terhubung satu sama lain.

Kalau pengunjung sudah mulai lapar tidak perlu khawatir karena di wisata mangrove tersebut tersedia kafe - kafe terapung dan terdapat beberapa Pedagang Kaki Lima yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Pengunjung bisa menikmati hidangan sambil menyaksikan panorama air laut yang membiru dihiasi dengan gugusan pulau 9 yang terpampang jelas di depan mata.

Ini merupakan suatu keuntungan lagi bagi pemilik kafe apung dan Pedagang Kaki Lima karena dengan banyaknya pengunjung yang datang ke wisata mangrove tersebut yang didukung oleh panorama wisata yang indah maka penghasilan mereka pun akan semakin banyak. Setidaknya penghasilan yang didapatkan bisa mencukupi biaya keseharian mereka, sesuai dengan yang telah mereka paparkan ketika peneliti melakukan wawancara ketika sedang melakukan penelitian.

Di samping keuntungan-keuntungan yang masyarakat dapatkan dari wisata mangrove tersebut, namun adapula beberapa masalah yang mereka hadapi. Masalah-masalah tersebut yaitu mengenai sampah dan abrasi. Sampah yang mereka keluhkan disini adalah sampah-sampah yang diakibatkan oleh para pengunjung yang datang. Pengunjung kerap kali tidak memedulikan kebersihan di wisata mangrove tersebut sehingga mengakibatkan wisata mangrove berkurang daya tariknya dari segi panorama dan pengunjung pun akan berkurang daya tariknya.

Ketika masalah sampah ini terus dikeluhkan oleh para pemilik usaha yang berada di wisata mangrove, maka pihak penanggungjawab pun turun tangan untuk kemudian mencari jalan keluarnya. Pengelola wisata mangrove bekerja sama dengan Kepala Desa untuk membuat beberapa tempat sampah yang akan ditempatkan di beberapa sudut yang didukung oleh spanduk-spanduk besar berisikan ajakan untuk menjaga kebersihan sehingga pengunjung dapat mematuhi aturan kebersihan yang ada.

Masalah selanjutnya yaitu abrasi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap tahunnya pasti akan ada musim dimana ombak mengalami pasang sehingga berakibat fatal bagi usaha-usaha kafe dan wahana sehingga ini juga meresahkan pemilik-pemilik usaha tersebut. Namun pengelola dan Kepala Desa pun cepat tanggap akan hal tersebut. Mereka membangun tembok penghalang ombak sehingga dapat mencegah pasangannya air laut.

Salah satu penyemangat para pemilik usaha di wisata mangrove adalah kerjasama antara pihak pengelola dan Kepala. Kerjasama yang tidak pernah

ada putusnya dalam proses pengelolaan dan pengembangan wisata tersebut sehingga para pemilik usaha yang berdomisili di area kawasan hutan mangrove merasa terjaga dan memberdayakan serta memanfaatkan keberadaan wisata ini.

Para pemilik usaha yakni pemilik kafe apung, Pedagang kaki Lima, dan wahana speedboat juga saling bekerjasama dalam pemanfaatan wisata mangrove. Hal yang menarik dari pemilik usaha ini adalah mereka bersaing secara sehat. Ini dibuktikan dari jualan mereka seperti di kafe apung tidak menjual semacam kerang-kerang-an namun Pedagang Kaki Lima memperadakan benda tersebut sehingga mereka saling melengkapi.

Dari beberapa penjabaran di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan wisata mangrove Desa Tongke-Tongke sudah dikelola cukup baik oleh pemerintah/ penanggungjawab dan pemilik usaha itu sendiri. Ini ditandai dengan adanya pergerakan langsung dari pihak pengelola dan Kepala Desa Tongke-Tongke seperti pemberadaan beberapa tempat sampah dan spanduk-spanduk yang bertemakan kebersihan.

Ketika masalah-masalah yang muncul dapat segera diatasi untuk pengembangan pengelolaan wisata mangrove maka minat pengunjung pun akan bertambah, dan lagi-lagi ini merupakan hal penting bagi para pemilik usaha di kawasan mangrove tersebut. Dengan kata lain, salah satu bentuk pemanfaatan wisata mangrove ini yaitu memberikan peluang kerja atau menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat atau penduduk setempat sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan perekonomian mereka.

C. Kesesuaian Teori dengan Hasil Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori sosiologi lingkungan dan lingkungan yang berpusat pada kehidupan, pertimbangan memilih pendekatan ini karena teori ini memusatkan penelitian atau penjelasan pada hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya. Sosiologi lingkungan terdiri dari dua suku kata, yaitu *sosiologi* dan *lingkungan*. Oleh karena itu untuk lebih memahami paper ini akan kami jelaskan terlebih dahulu pengertian masing-masing sosiologi, lingkungan dan sosiologi lingkungan. Teori Lingkungan yang Berpusat pada Kehidupan dalam buku Sosiologi Lingkungan dikutip oleh Dwi Susilo, M.A. (2014) menyatakan bahwa manusia memiliki kewajiban moral terhadap alam. Albert Schweitzer menyatakan, penghargaan yang harus dilakukan manusia tidak hanya pada diri sendiri saja, tetapi juga kepada semua bentuk kehidupan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan.

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKM) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Bagi kelompok penduduk yang karena keadaannya mempunyai keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkat kemampuannya dan memberikan dukungan agar dapat memmanfaatnya akses yang terbuka. Dukungan yang mendasar dan secara umum diberikan kepada pendudukan miskin, antara lain dengan

memberikan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau.

Dari hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pola penguasaan ruang wisata mangrove di Desa Tongke-tongke dengan cara memperbanyak wahana dan menjaga kebersihan wisata mangrove. Untuk mendorong pengunjung sebenarnya di lihat dari tampak fisik baik itu dari sarana dan prasarana yang di sediakan di tempat wisata tersebut. Di lain sisi masih ada kendala yang dihadapi pengelola baik itu masalah kebersihan dan masalah abrasi. Masalah kebersihan sebenarnya itu tergantung dari kesadaran pengunjung yang tidak membuang sampah sembarang tempat sedangkan jika masalah abrasi tergantung dari kuasa tuhan tetapi harus ada usaha oleh pengelola untuk membuat tanggul sebagai penahan ombak.

Dalam menjawab hasil penelitian maka peneliti menggunakan teori lingkungan yang berpusat pada kehidupan seperti halnya dalam pembangunan wisata mangrove yang bisa menunjang kehidupan masyarakat. Pembangunan wisata mangrove sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat setempat sehingga tidak terjadi lagi kemiskinan di masyarakat sinjai khususnya di Desa Tongke-tongke. Penguasaan ruang pada wisata mangrove dengan membangun sarana dan prasarana untuk mempengaruhi pengunjung agar terjadi peningkatan wisatawan sehingga terjadi peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

BAB VI

DAMPAK EKONOMI WISATA MANGROVE

A. Hasil Penelitian

Masyarakat Sinjai yang notabenenya adalah bekerja sebagai petani dan nelayan kini sangat terbantu oleh adanya wisata mangrove. Wisata mangrove ini telah menjadi salah satu daerah wisata yang cukup dikagumi oleh penduduk Indonesia bahkan di luar Indonesia sekalipun. Ini dibuktikan bahwa wisata mangrove ini telah dikunjungi beberapa traveller bahkan Menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi Puji Astuti langsung berkunjung ke Sinjai untuk melihat langsung keadaan wisata mangrove Tongke-Tongke.

Semua lahan yang ada di wisata mangrove Tongke-Tongke disamping memberikan peluang kerja atau dengan kata lain mengurangi tingkat pengangguran, juga meningkatkan pendapatan masyarakat Sinjai Timur. Ibrahim M. (2015 : 17) menyatakan bahwa beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain penebangan hutan secara liar, perburuan liar, merusak hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarang tempat, bangunan liar di daerah aliran sungai, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Akibatnya habitat-habitat yang seharusnya diperuntukkan bagi spesies (biota) laut semakin sempit. Padahal, spesies-spesies yang hidup di udara dan darat amat bergantung pada keberadaan hutan mangrove. Akibatnya spesies-spesies tersebut mencari habitat baru yang menambah persoalan manusia.

Olehnya itu perlu kesadaran untuk menjaga hutan karena hutan adalah salah satu bagian dari lingkungan. Pengelolaan hutan yang bersifat kompleks dengan multikomponen dan multiaspek di dalamnya, memerlukan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan sosiologi yang menitikberatkan perhatiannya pada masyarakat, dalam hal ini masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Masyarakat tersebut dipandang sebagai bagian dari ekosistem hutan, sehingga tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pengelolaan hutan. Hal ini juga didukung oleh tanggapan dari Kepala Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur, Bapak Sirajuddin yang mengatakan bahwa :

“Iya Alhamdulillah, semenjak adanya wisata mangrove, pendapatan warga Sinjai Timur khususnya di Desa Tongke-Tongke semakin meningkat dan bisa membantu warga mengatasi masalah ekonominya. Pokoknya semampunya saya selaku Kepala Desa akan terus mengembangkan wisata mangrove ini” (Hasil wawancara pada tanggal 10 januari 2018)

Senada dengan wawancara di atas, salah satu responden yang bernama Diana mengatakan bahwa :

“Kalau dihitung-hitung yah pendapatan saya tiap tahunnya meningkat. Ini semua berkat para pengelola wisata mangrove, Kepala Desa dan organisasi Aku Cinta Indonesia (ACI), karena berkat mereka-mereka lah sehingga membuat wisata mangrove ini menjadi dikenal banyak orang. Jadi kan juga mengundang minat orang-orang datang berkunjung kesini. Kalau banyak yang tahu, banyak yang datang, otomatis pendapatan juga bertambah. Cukuplah untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak ekonomi yang diberikan wisata mangrove di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai berdampak positif. Ini dibuktikan

dengan pendapatan warga yang tiap tahunnya meningkat dari hasil jual-jualan dan wahana yang dimanfaatkan dengan baik oleh warga Desa Tongke-Tongke.

Kunjungan tersebut sangat membantu perkembangan wisata mangrove Tongke-Tongke, terutama penghasilan masyarakat Sinjai Timur. Wisata mangrove memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat karena dengan adanya lahan yang diberikan pengelola wisata kepada masyarakat, pendapatan kebutuhan dapat bertambah. Seperti yang diungkapkan oleh Hj. Hasma yang mengatakan bahwa :

“Wisata mangrove ini sangat membantu penghasilan saya karena dari sinilah saya mendapatkan penghasilan, dari jual-jualan, namun memberikan pendapatan yang cukup karena pengunjung ramai berkunjung. Harapan kami sebenarnya kepada pemerintah untuk membantu dalam penambahan wahana bermain untuk anak supaya bertambah ki pengunjung setiap saatnya. Biasanya kalau hari libur pastinya anak mau rekreasi.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Senada dengan wawancara di atas salah satu responden yang bernama Rostina mengatakan bahwa :

“Saya sangat bersyukur tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, ternyata dengan usaha kecil pun saya bisa mendapatkan banyak penghasilan. Ini semua karena wisata mangrove ini. Pokoknya sangat membantu ekonomi keluarga saya lah untuk keperluan sehari-hari dan untuk kebutuhan pendidikan anak. Biasanya setiap harinya itu bisa saya dapat penghasilan sekitar Rp 100.000 apalagi pada hari minggu, pengunjungnya menikat dari hari-hari biasanya ” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengungkapkan bahwa wisata mangrove memberikan peluang kerja kepada masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan tingkat ekonominya. Dengan adanya lahan yang disediakan maka masyarakat mendapatkan keuntungan dan

kesempatan untuk mendirikan usaha kecil-kecilan. Dari usaha inilah masyarakat Sinjai yang berada di kawasan wisata mangrove mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Bentuk-bentuk lahan pencaharian (usaha kecil-kecilan) yang disediakan wisata mangrove Tongke-Tongke :

1. Kafe Apung

Kafe apung yang disediakan berjumlah empat kafe. Kafe ini menjual beberapa jenis makanan dan minuman sehingga menarik pengunjung yang datang untuk bersantai sambil menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Selain itu, kafe apung ini juga dilengkapi dengan sound agar pengunjung tidak jenuh menikmati pemandangan di sekitar wisata mangrove.

Salah satu pemilik kafe apung yang bernama Irmawati mengatakan bahwa :

“Kafe saya ini lebih dipadati pengunjung pada hari Minggu dibanding dengan hari-hari lainnya, mungkin karena hari libur. Kalau hari-hari lain orang-orang pada kerja dan juga waktunya sekolah. Kalau pendapatan saya juga tergantung dari banyaknya pengunjung yang datang. Kalau ramai pengunjung yah pastinya makanan dan minuman saya juga banyak yang laku. Kafe ini memang yang paling diminati pengunjung karena tempatnya diatas air laut yang biasa di jadikan tempat untuk berfoto bersama keluarga.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Senada dari wawancara Ibu Irmawati, salah satu responden yang bernama Hj. Hasma yang juga merupakan pemilik kafe apung menyatakan bahwa :

“Begini yah dek, sebenarnya sih penghasilan saya setiap harinya tergantung dari pengunjung yang datang. Jadi semakin banyak

yang berkunjung saya sangat senang karena bisa menopang penghasilan. semua yang punya tempat di sini itu adalah masyarakat setempat yang berinisiatif untuk membuat kafe jadi tidak ada uang sewa tempat.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa sangatlah berpengaruh jumlah pengunjung yang datang ke wisata mangrove Tongke-Tongke. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, semakin berdampak baik bagi perekonomian masyarakat. Selain itu, hari Minggu merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu pemilik kafe Apung karena jumlah pengunjung di hari Minggu lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari lainnya.

2. Pedagang Kaki Lima

Salah satu lahan yang disediakan wisata mangrove adalah ditujukan untuk Pedagang-pedagang Kaki Lima. Pedagang kaki Lima yang ada di wisata mangrove Tongke-Tongke juga berjumlah empat. Lokasi Pedagang Kaki Lima hanya beralokasi di beberapa pinggir-pinggir jalur kecil menuju ke kafe apung.

Berbeda dengan isi jualan yang ada di kafe apung, para Pedagang Kaki Lima lebih mendominasi menjual beberapa jenis kerang dengan berbeda motif pula. Namun, mereka juga menyediakan beberapa jenis minuman dan makanan ringan.

Rostina salah satu Pedagang Kaki Lima mengatakan bahwa :

“Jualan saya yang paling laku adalah kerang-kerang dengan motif-motif yang memang menarik pengunjung. Mungkin sama dengan Pedagang Kaki Lima yang lainnya. Kalau minuman dan makanan ringan juga banyak yang laku cuma mungkin karena di

kafe-kafe apung kan tidak menjual berbagai macam kerang jadi yang lebih laku yah kerang-kerang-an. Biasanya pengunjung itu membeli kerang-kerang untuk oleh-oleh keluarga dan bisa juga dijadikan hiasan rumah.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Pedagang Kaki Lima lain yang bernama Diana juga menambahkan bahwa:

“Kan kalau penghasilan saya meningkat atau lebih, saya bisa menambahkan lagi jenis-jenis jualan saya. Yah kalau perlu jualan yang ditambahkan itu jenis jualan yang belum disediakan di kafe apung. Jadi kan bisa menambah pemasokan. Kafe apung memang mempunyai jenis minuman yang beda dengan yang saya jual tapi kalau misalkan peminat ya lebih banyak di sini. Ka biasanya orang cari minuman dingin apalagi lebih murah dibanding di kafe apung.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penghasilan Pedagang Kaki Lima sangat dibantu dengan beberapa jenis kerang yang mereka jual. Itu disebabkan karena di tempat lain atau di kafe apung tidak menjual kerang-kerang-an jadi penghasilan masing-masing berjalan sepadan. Selain itu, jiwa persaingan mereka bisa dibilang sangat bagus karena para Pedagang Kaki Lima mampu melihat peluang usaha dengan menjual barang-barang yang tidak disediakan oleh pedagang yang lain sehingga jualan mereka saling menutupi.

3. Speedboat

Kawasan wisata Mangrove Tongke-Tongke memiliki sejumlah sarana dan prasarana seperti kamar mandi, serta lokasi parkir baik roda dua maupun roda empat sudah tersedia di tempat wisata ini. Fasilitas lainnya yaitu Kantor Pengelola, Mushollah, Kios dan Cafeteria, Dermaga Wisata Perahu, Area Pemancingan serta Area Pembibitan. Wisata perahu atau

biasa di sebut speedboar adalah salah satu wahana laut yang menggunakan perahu sebagai alat transportasi. perahu motor adalah perahu yang memiliki mesin.

Speedboat adalah salah satu wahana yang diminati banyak pengunjung dan dikelola oleh dua orang, ditambah dengan speedboat adalah satu-satunya wahana yang terdapat di wisata mangrove Tongke-Tongke. Wahana ini dimanfaatkan pengunjung untuk menelusuri dan melihat langsung kondisi dan pemandangan hutan bakau yang ada di sekitar wisata mangrove Tongke-Tongke. Karena wahana ini adalah wahana satu-satunya yang ada, maka juga bisa meningkatkan tingkat penghasilan. Seperti yang dikatakan Tahir yang merupakan salah satu pengelola wahan speedboat bahwa :

“Wahana speedboat ini sangat membantu penghasilan saya karena seperti yang adek lihat kalau ini adalah satu-satunya wahana yang ada di wisata mangrove ini. Speedboat ini kan juga muat banyak orang jadi saya bisa mendapatkan banyak penghasilan tiap sekali jalan atau keliling hutan bakau ini. Biasa saya kewalahan ketika hari-hari libur, apalagi speedboar saya terbatas karena Cuma satu jadi banyak pengunjung berebutan. ” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Desember 2017)

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyatakan bahwa tidak hanya dari kafe apung, Pedagang Kaki Lima, tetapi wahana speedboat pun juga sangat berarti bagi masyarakat yang memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pengelola wisata mangrove Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

Dampak ekonomi wisata mangrove tongke-tongke sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat. Hutan mangrove di

sepanjang pesisir pantai dan sungai secara umum menyediakan habitat bagi berbagai jenis ikan. Hutan mangrove sebagai salah satu lahan basah di daerah tropis dengan akses yang mudah serta kegunaan komponen biodiversitas dan lahan yang tinggi telah menjadikan sumberdaya tersebut sebagai sumberdaya tropis yang kelestariannya akan terancam dan menjadi salah satu pusat dari isu lingkungan global. Konversi hutan mangrove terus meningkat untuk dijadikan lahan pertanian atau tambak ikan/udang, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas ekosistem tersebut.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari penjabaran hasil penelitian di atas dikatakan bahwa wisata mangrove di Desa Tongke-Tongke memberikan peluang kerja kepada penduduk desa setempat. Hal ini ditandai dengan adanya lahan yang diberikan pihak pemerintah dan pengelola seperti organisasi ACI (Aku Cinta Indonesia) kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha di wisata mangrove.

Beberapa lahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Desa Tongke-Tongke yaitu lahan untuk kafe apung, Pedagang Kaki Lima, dan Wahana Speedboat. Masing-masing lahan tersebut memiliki pemilik yang diberikan amanah dan tanggungjawab oleh pihak pengelola, dalam artian Pemerintah, organisasi ACI, dan Kepala Desa Tongke-Tongke itu sendiri.

Keunikan dari lahan yang ada di wisata mangrove ini adalah pihak pemerintah tidak dikenakan biaya pajak dan biaya yang lain-lain. Jadi tidak memperadakan istilah IMB (Izin Membangun Bangunan) sesuai dengan

hasil wawancara antara peneliti dengan pemilik kafe apung. Para pemilik usaha hanya menerima tempat, selebihnya adalah hanya dikelola oleh mereka.

Lahan pertama yaitu tiga buah lahan yang disediakan untuk kafe apung. Pihak pengelola hanya menyediakan lahan. Di luar dari itu, pihak pemilik kafe lah yang bertugas merias kafe tersebut sedemikian rupa cantiknya yang akan menarik pengunjung. Begitupun dengan isi jualan dari kafe apung, para pemiliklah yang berhak menentukan apa yang akan mereka jual.

Manfaat dari kafe-kafe apung ini adalah menyediakan tempat bagi pengunjung baik yang tidak hanya ingin makan dan minum ketika lapar dan haus namun juga sebagai tempat beristirahat sembari menikmati pemandangan kawasan wisata mangrove yang ada di sekeliling mereka. Ini merupakan suatu hal dan momen yang paling diharapkan oleh pemilik kafe apung karena semakin banyak pengunjung yang datang maka semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan.

Lahan kedua yaitu tiga buah lahan yang disediakan untuk para Pedagang Kaki Lima. Memang sepintas terlihat sama manfaatnya dari kafe apung, akan tetapi ada satu hal yang membedakan di antara keduanya. Bedanya adalah para Pedagang Kaki Lima ini menyediakan jual-jualan berupa kerang-kerang-an yang terdiri dari beberapa jenis ukuran yang berbeda dan motif yang berbeda pula. Kerag-kerang-an inilah yang sangat membantu para Pedagang Kaki Lima untuk menarik perhatian pengunjung.

Lahan yang ketiga yang disediakan oleh pihak pengelola wisata mangrove adalah lahan untuk wahana speedboat. Wahana speedboat ini

hanya berjumlah satu buah sehingga ketika peneliti melakukan wawancara salah satu harapan dari pemilik wahana adalah perlu penambahan wahana speedboat. Ini dikarenakan karena terkadang ada banyak pengunjung yang ingin mencoba wahana speedboat namun ukuran speedboat yang tidak begitu besar jadi tidak mampu menampung banyak pengunjung sehingga para pengunjung harus menunggu dulu.

Selain lahan juga terdapat area parkir dimana yang diberikan wewenang pun juga berasal dari penduduk setempat Desa Tongke-Tongke. Masyarakat pun lagi-lagi sangat mendapatkan bantuan dari adanya tempat wisata tersebut. Mereka tidak pernah berhenti berusaha menggunakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Berdasarkan hasil pemaparan mengenai lahan di atas terlihat jelas bahwa para pemilik usaha sangat terbantu perekonomiannya semenjak adanya wisata mangrove ini. Di samping karena kerjaannya yang tidak rerlalu menguras tenaga dan rumah para pemilik usaha pun dekat dari wisata tersebut karena mereka adalah penduduk asli Desa Tongke-Tongke.

Wisata mangrove yang terletak di Desa Tongke-Tongke ini sangat membantu tingkat perekonomian masyarakat setempat sehingga dapat dikatakan bahwa wisata mangrove tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat yang memang benar-benar ingin memanfaatkan peluang kerja yang ada. Di samping itu, mereka (para pemilik usaha) tidak pernah berjalan sendiri-sendiri, namun mereka selalu mendapat bantuan dan dorongan motivasi oleh para pihak pengelola wisata mangrove.

Ketika wisata mangrove memberikan dampak positif bagi para pemilik usaha maka berdasarkan hasil penelitian di atas dikatakan bahwa mereka (para pemilik usaha) dapat menambahkan lebih banyak jenis jual-jualan mereka. Dengan begitu perekonomian mereka akan tetap berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah mereka harapkan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa rata-rata pengunjung yang datang lebih banyak jumlahnya ketika waktu libur dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Namun hal ini bukan berarti masalah bagi mereka karena setiap pengunjung yang datang tetap membeli jual-jualan mereka sambil menikmati pemandangan indah di kawasan mangrove. Begitupun dengan wahana speedboat, tidak jarang pengunjung yang ingin mencoba wahana tersebut.

Hal ini tidak semerta-merta langsung mereka dapatkan tingkat penghasilan yang seperti itu, tetapi juga melalui beberapa proses atau tahapan-tahapan sehingga wisata hutan mangrove terlihat lebih baik sampai saat ini tetap dengan bantuan pemerintah dan organisasi Aku Cinta Indonesia (ACI) dan Kepala Desa Tongke-Tongke.

Proses wisata mangrove yang sangat berkembang pesat dan diminati oleh banyak kalangan luar ini tidak luput dari tujuan utama dari perekonomian rakyat itu sendiri dimana pihak pengelola sangat mempertimbangan sasaran-sasaran pokok perekonomian rakyat tersebut ke dalam garis besar yang meliputi tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat, terselenggaranya sistem jaminan

sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.

Berdasarkan sasaran pokok perekonomian di atas yang telah dipertimbangkan oleh pihak pengelola wisata mangrove Desa Tongke-Tongke, maka terciptalah wisata mangrove yang sampai saat ini memberikan dampak positif terhadap tingkat perekonomian masyarakat setempat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan wisata mangrove itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat penduduk Desa Tongke-Tongke harus betul-betul menjaga kelestarian kawasan wisata mangrove agar tetap indah sampai saat ini.

Adapun pemaparan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak ekonomi wisata mangrove di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai adalah dampak positif karena dari wisata mangrove inilah para penduduk setempat mendapatkan pekerjaan yang bisa menunjang tingkat perekonomian mereka. Hal ini didukung dengan disediakan lahan (lapangan kerja) kepada mereka dan juga dukungan langsung dari pemerintah sehingga dari tahun ke tahun penghasilan mereka juga meningkat sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

C. Kesesuaian Teori dengan Hasil Penelitian

Tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu

dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut : (1) tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat, (2) terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar, (3) terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat, (4) terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat, dan (5) terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat (Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul: Kewirausahaan “Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk Miskin”). Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: *pertama*, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. *Kedua*, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini

bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan.

Dari hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak ekonomi wisata mangrove di Desa tongke-tongke berdampak positif bagi masyarakat dalam membantu meningkatkan perekonomian untuk menunjang kehidupannya. Masyarakat sangat bersyukur dengan adanya wisata mangrove ini karena mereka tidak lagi susah dalam hal pekerjaan. Masyarakat tongke-tongke lebih dominan berprofesi sebagai petani dan nelayan dan profesi ini sebenarnya adalah pekerjaan musiman tergantung dari waktu. Jadi dengan adanya wisata mangrove ini mereka bisa beralih profesi sebagai pengelola wisata dan sebenarnya tidak mengganggu aktivitas utama mereka karena pekerjaan sebagai pengelola bersifat kekeluargaan atau bisa digantikan.

Dalam menjawab hasil penelitian maka peneliti menggunakan teori ekonomi kerakyatan yang berpusat pada pendekatan ekonomi berskala kecil seperti pemberdayaan wisata mangrove yang notabeneanya berjualan makanan dan minuman ringan. Dari penjualan ini masyarakat mampu menunjang kebutuhan ekonomi keluarga dalam kehidupan sehari-harinya.

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Pola penguasaan ruang wisata mangrove di Desa Tongke-tongke dengan cara memperbanyak wahana dan menjaga kebersihan wisata mangrove. Untuk mendorong pengunjung sebenarnya di lihat dari tampak fisik baik itu dari sarana dan prasarana yang di sediakan di tempat wisata tersebut. Di lain sisi masih ada kendala yang dihadapi pengelola baik itu masalah kebersihan dan masalah abrasi. Masalah kebersihan sebenarnya itu tergantung dari kesadaran pengunjung yang tidak membuang sampah sembarang tempat sedangkan jika masalah abrasi tergantung dari kuasa tuhan tetapi harus ada usaha oleh pengelola untuk membuat tanggul sebagai penahan ombak.
2. Dampak ekonomi wisata mangrove di Desa tongke-tongke berdampak positif bagi masyarakat dalam membantu meningkatkan perekonomian untuk menunjang kehidupannya. Masyarakat sangat bersyukur dengan adanya wisata mangrove ini karena mereka tidak lagi susah dalam hal pekerjaan. Masyarakat tongke-tongke lebih dominan berprofesi sebagai petani dan nelayan dan profesi ini sebenarnya adalah pekerjaan musiman tergantung dari waktu. Jadi dengan adanya wisata mangrove ini mereka

bisa beralih profesi sebagai pengelola wisata dan sebenarnya tidak mengganggu aktivitas utama mereka karena pekerjaan sebagai pengelola bersifat kekeluargaan atau bisa digantikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya pemerintah memberikan sumbangsi ekonomi dalam penambahan wahana wisata mangrove di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai supaya lebih menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke wisata mangrove tersebut.
2. Sebaiknya pengunjung lebih memperhatikan tata tertib atau aturan yang berlaku selama berada di lokasi wisata supaya kelestarian, keamanan, dan kebersihan di sekitar kawasan mangrove terjaga dengan baik.
3. Sebaiknya peneliti selanjutnya lebih memperbanyak jumlah responden dan waktu penelitian supaya dapat lebih memperluas informasi yang didapatkan mengenai wisata mangrove yang berlokasi di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aminah. 2011. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebagai Upaya Pengakuan Hak Masyarakat*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arifin, J. dkk. 2015. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar : FKIP Unismuh Makassar.
- Damayanti. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Kabupaten Sinjai*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Fadhlan, M. 2010. *Pengaruh Aktivitas Ekonomi Penduduk Terhadap Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan*. FIS UNIMED. Medan.
- Ghufran, M. dan Kordi H. 2012. *Ekosistem Mangrove (Potensi, Fungsi, dan Pengelolaan)*. Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahab, N. dan P.G. Reymond, 2011. *Analisis Indikator Utama Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo*. Jurnal Sosek KP, Volume 6, No. 1, Tahun 2011.
- Mubyarto, dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan*. Lembaga Suluh Nusantara. American Institute For Indonesian Studies (AIFIS). Jakarta.
- Seonaji, G. dan Hidayat, M. F. 2016. *Peranan Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Bengkulu dalam Mitigasi Pemanasan Global Melalui Penyimpanan Karbon*. Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 23 No. 3, Bengkulu.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.
- _____. 2007. *Sosilogi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. Persada.
- Supriatna, J. 2008. *Melestarikan Alam Indondonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Patang, 2012. *Analisis Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove (Kasus di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai)*. Jurnal Agrisistem, Vol. 8 No. 2.

Internet :

- Erlin, 2011. *Laporan Praktikum Mangrove*.
<http://wwwbiotell.blogspot.com./2011/05/praktikum-mangrove.html>
 diakses tanggal 1 April 2013.
- Lestari, W. S. 2015. *Teknik Pengumpulan Data*.
<https://www.google.co.id/amp/s/wiwiksunaryatipujilestari.wordpress.com/2015/03/26/teknik-pengumpulan-data/amp/>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2015.
- Himakel, 2012. *Peranan Ekosistem Mangrove*, HIMAKEL (internet),
 (himakel.blogspot.co.id/2012/11/peranan-ekosistem-mangrove.html?m=1),
 (diakses 23 November 2012).
- Muqarrobin, F. 2014. *Instrument Penelitian*.
www.eurekapedidikan.com/2014/11/instrumen-penelitian.html?m=1
 diakses pada November 2014.
- Samiun, A. 2015. *Pengertian Analisis Data, Tujuan dan Tekniknya*.
www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-data-tujuan-dan-tekniknya.html# diakses pada Agustus 2015.
- Pelu, Z. 2009. *Method of Qualitative*.
 zorayapelu.blogspot.co.id/2009/04/method-of-qualitative.html?m=1 di
 akses pada 8 April 2009

PEDOMAN WAWANCARA

POLA PENGUASAAN RUANG DAN DAMPAK EKONOMI WISATA

MANGROVE

Nama : Sirajuddin
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimanakah karakteristik umum kawasan di kelurahan/kecamatan anda?	Kecamatan Sinjai Timur merupakan salah satu kecamatan pesisir di Kota Sinjai. Kondisi geografis terletak pada ketinggian 3 M dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 32°C.
2.	Bagaimana pemerintah merespon perkembangan ruang pada kawasan wisata mangrove?	Pemerintah khususnya dari Menteri Perikanan memberikan wahana speedboat dan sekarang ditambahkan satu wahana kolam renang di dalam kawasan mangrove yang masih dalam proses perencanaan.
3.	Langkah –langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan wisata mangrove?	Masalah yang lainnya itu selain sampah adalah abrasi. Kalau cuaca buruk itu juga bisa berpengaruh buruk terhadap kawasan di wisata mangrove Desa Tongke-Tongke. Maka, saya selaku Kepala Desa mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota ACI untuk memikirkan solusi dari masalah abrasi ini. Ternyata masalah ini juga menarik perhatian dari pemerintah. Nah jadilah pemerintah dalam artian Menteri Perikanan dan Kelautan memutuskan untuk membangun tembok penahan gelombang dan alhamdulillah memang sangat menolong.
4.	Program-program apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pemanfaatan ruang di kawasan wisata mangrove?	Ada dua program yang telah dilakuka, itu adalah pemberadaan beberapa tempat sampah agar kebersihan tetap terjaga, kemudian pembangunan tembok penahan ombak.

5.	Apa harapan anda kedepannya dalam kaitannya dengan ruang pada kawasan wisata mangrove?	Iya Alhamdulillah, semenjak adanya wisata mangrove, pendapatan warga Sinjai Timur khususnya di Desa Tongke-Tongke semakin meningkat dan bisa membantu warga mengatasi masalah ekonominya. Pokoknya semampunya saya selaku Kepala Desa akan terus mengembangkan wisata mangrove ini.
----	--	---

PEDOMAN WAWANCARA
POLA PENGUASAAN RUANG DAN DAMPAK EKONOMI WISATA
MANGROVE

Nama : Aswar

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat, ACI (Aku Cinta Indonesia)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimanakah karakteristik umum kawasan di kelurahan/kecamatan anda?	Kondisi geografis Kecamatan Sinjai Timur di Desa Tongke-Tongke terletak pada ketinggian 3 M dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 32°C.
2.	Bagaimana pemerintah merespon perkembangan ruang pada kawasan wisata mangrove?	Menurut saya pemerintah sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik karena seperti yang adek lihat dengan situasi wisata mangrove sekarang, jauh lebih baik dari sebelumnya baik dari dermaga kayunya maupun dari sarana dan prasarana nya.
3.	Langkah –langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan wisata mangrove?	Pertama-tama itu pemerintah merenovasi sedemikian rupa wisata mangrove ini, lalu kemudian menyediakan lahan usaha untuk masyarakat Desa Tongke-Tongke yang kemudian dimanfaatkannya dengan baik.
4.	Program-program apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pemanfaatan ruang di kawasan wisata mangrove?	Sampah dek, itu sangat mengganggu sekali. Tapi ACI dan Kepala Desa sudah melakukan pergerakan jadi alhamdulillah masalah sampah ini sudah teratasi. Sudah disediakan beberapa tong sampah di setiap sudut jalan, baliho dan poster-poster besar, kata-kata bijak tentang kebersihan. Program-program ini sangat membantu sekali baik untuk pemilik usaha maupun untuk pengunjung yang

		datang.
5.	Apa harapan anda kedepannya dalam kaitannya dengan ruang pada kawasan wisata mangrove?	Harapan saya kedepannya adalah pemerintah lebih mengontrol lagi kondisi wisata mangrove ini agar supaya tidak memunculkan lagi permasalahan seperti sampah dan abrasi.

PEDOMAN WAWANCARA

POLA PENGUASAAN RUANG WISATA MANGROVE

Nama : Tahir

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta (Pengelola Speedboat)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pola pemanfaatan ruang yang ada di kawasan wisata Mangrove ?	Pola pemanfaatannya itu menurut saya termasuk bervariasi karena wisata mangrove ini terdiri dari beberapa jalur speedboat untuk mengelilingi kawasan mangrove.
2.	Apa saja yang menjadi indikator dalam pengurusan IMB di kawasan wisata mangrove?	Iya saya kan ceritanya disini cuma sebagai pengelola wahana speedboat ini, nah yang menyediakan speedboat ini itu sebenarnya pemerintah. Speedboat ini langsung diberikan dengan cuma-cuma oleh Menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi Puji Astuti kepada organisasi Aku Cinta Indonesia (ACI) yang juga membantu mengelola wisata ini. Terus wahana ini alhamdulillah saya dan teman saya yang satu itu yang diberikan tanggung jawab untuk mengelolanya. Jadi kan bisa menambah penghasilan juga.
3.	Apakah ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan pemanfaatan ruang di kawasan wisata mangrove? Kalau ada, permasalahan-permasalahan pemanfaatan ruang seperti apakah yang saat initerjadi?	Ada, permasalahannya itu ombak yang membuat pengunjung takut menggunakan speedboat untuk berkeliling menikmati pemandangan wisata mangrove.
4.	Tindakan apa saja yang dilakukan oleh aparat kelurahan/kecamatan dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut?	Pengelola mangrove bekerjasama dengan Kepala Desa untuk membuat tanggul penahan ombak.
5.	Apa saran dan harapan anda dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang terbangun di kawasan wisata mangrove?	Saran saya adalah agar kiranya menambahkan speedboat lagi agar pengunjung tidak perlu antri lagi ketika ingin menggunakan wahana speedboat ini.

PEDOMAN WAWANCARA

DAMPAK EKONOMI WISATA MANGROVE

Nama : Tahir

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta (Pengelola Speedboat)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana dampak ekonomi terhadap adanya wisata mangrove ?	Sangat berdampak baik karena banyak pengunjung yang berminat menggunakan wahana speedboat ini untuk berkeliling kawasan mangrove.
2.	Bagaimana pengaruh perekonomian masyarakat terhadap parawisata di sekitar kawasan wisata mangrove ?	Wahana speedboat ini sangat membantu penghasilan saya karena seperti yang adek lihat kalau ini adalah satu-satunya wahana yang ada di wisata mangrove ini. Speedboat ini kan juga muat banyak orang jadi saya bisa mendapatkan banyak penghasilan tiap sekali jalan atau keliling hutan bakau ini. Biasa saya kewalahan ketika hari-hari libur, apalagi speedboar saya terbatas karena Cuma satu jadi banyak pengunjung berebutan.
3.	Apa dampak datangnya wisatawan terhadap perekonomian di sekitar kawasan wisata mangrove ?	Dampaknya pasti ada karena semakin banyak wisatawan yang datang, penghasilan saya juga bertambah.
4.	Bentuk kegiatan apa sajakah yang berdampak pada ekonomi masyarakat ?	Ketika pengunjung datang otomatis mereka akan berfoto-foto lalu kemudian meng-upload sehingga wisata ini jadi dikenal banyak orang dan pengunjung pun akan bertambah, menurut saya itu berdampak pada ekonomi saya juga.
5.	Apakah pendapatan yang didapatkan dari tahun ke tahun semakin meningkat atau menurun? Mengapa?	Bisa dibilang meningkat karena wisata ini kan sudah banyak yang tahu jadi dari tahun ke tahun semakin banyak yang berkunjung.

PEDOMAN WAWANCARA

POLA PENGUASAAN RUANG WISATA MANGROVE

Nama : Hj. Hasma
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengelola Kafe Apung)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pola pemanfaatan ruang yang ada di kawasan wisata Mangrove ?	Salah satu pola pemanfaatannya yaitu menyediakan lahan tempat usaha seperti kafe apung yang saya kelola saat ini.
2.	Apa saja yang menjadi indikator dalam pengurusan IMB di kawasan wisata mangrove?	Kalau masalah pengurusan membangun kafe-kafe di kawasan wisata mangrove ini kita hanya berurusan dengan organisasi ACI karena mereka lah selain Kepala Desa yang juga turun tangan langsung mengelola wisata ini. Dalam membangun tempat di sini itu kami tidak pernah bayar sewa atau uang apa saja. Sampai sekarang kami tidak pernah bayar uang pembangunan. Rata-rata yang mengelolah atau membangun tempat di sini itu masyarakat setempat, tidak ada masyarakat luar yang mengelolah wisata ini.
3.	Apakah ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan pemanfaatan ruang di kawasan wisata mangrove? Kalau ada, permasalahan-permasalahan pemanfaatan ruang seperti apakah yang saat ini terjadi?	Masalah yang saya dapat yaitu ombak yang membuat pengunjung merasa pusing ketika berada di atas kafe, dan masalah yang lain yaitu sampah.
4.	Tindakan apa saja yang dilakukan oleh aparat kelurahan/kecamatan dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut?	Tindakannya yaitu membuat spanduk berukuran cukup besar mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan tembok penahan ombak di beberapa titik.
5.	Apa saran dan harapan anda dalam kaitannya dengan pemanfaatan	Saran yaitu penambahan jumlah kafe apung agar terlihat ramai, harapan

	ruang terbangun di kawasan wisata mangrove?	saya semoga pengunjung tidak akan takut lagi untuk datang karena masalah ombak.
--	---	---

PEDOMAN WAWANCARA

DAMPAK EKONOMI WISATA MANGROVE

Nama : Hj. Hasma
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengelola Kafe Apung)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana dampak ekonomi terhadap adanya wisata mangrove ?	Yah dampaknya baik karena mengurangi pengangguran yang ada dengan memanfaatkan lahan usaha yang disediakan oleh pemerintah.
2.	Bagaimana pengaruh perekonomian masyarakat terhadap parawisata di sekitar kawasan wisata mangrove ?	Wisata mangrove ini sangat membantu penghasilan saya karena dari sinilah saya mendapatkan penghasilan, dari jual-jualan, namun memberikan pendapatan yang cukup karena pengunjung ramai berkunjung. Harapan kami sebenarnya kepada pemerintah untuk membantu dalam penambahan wahana bermain untuk anak supaya bertambah ki pengunjung setiap saatnya. Biasanya kalau hari libur pastinya anak mau rekreasi.
3.	Apa dampak datangnya wisatawan terhadap perekonomian di sekitar kawasan wisata mangrove ?	Semakin banyak wisatawan yang datang jadi penghasilan saya juga bertambah banyak jadi sangat berdampak positif untuk perekonomian saya.
4.	Bentuk kegiatan apa sajakah yang berdampak pada ekonomi masyarakat ?	Menurut saya salah satu bentuk yang berdampak pada ekonomi saya yaitu membuat menu makanan dan minuman yang berbeda dengan kafe apung yang lain sehingga memunculkan ketertarikan pengunjung.
5.	Apakah pendapatan yang didapatkan dari tahun ke tahun semakin meningkat atau menurun? Mengapa?	Begini yah dek, sebenarnya sih penghasilan saya setiap harinya tergantung dari pengunjung yang datang. Jadi semakin banyak yang berkunjung saya sangat senang karena bisa menopang penghasilan. semua

		yang punya tempat di sini itu adalah masyarakat setempat yang berinisiatif untuk membuat kafe jadi tidak ada uang sewa tempat.
--	--	--

PEDOMAN WAWANCARA

POLA PENGUASAAN RUANG WISATA MANGROVE

Nama : Rostina

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Kaki Lima)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pola pemanfaatan ruang yang ada di kawasan wisata Mangrove ?	Diantaranya yaitu saya merasa telah diberikan peluang kerja karena pemerintah dan pengelola-pengelola wisata mangrove ini telah memberikan lahan usaha untuk saya.
2.	Apa saja yang menjadi indikator dalam pengurusan IMB di kawasan wisata mangrove?	Kalau masalah izin usaha, kami-kami disini sebagai pemilik usaha hanya berurusan langsung kepada pengelola wisata mangrove, seperti organisasi ACI.
3.	Apakah ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan pemanfaatan ruang di kawasan wisata mangrove? Kalau ada, permasalahan-permasalahan pemanfaatan ruang seperti apakah yang saat ini terjadi?	Wah kalau berbicara tentang masalah, rata-rata kami disini sebagai pemilik usaha yah sangat terganggu dengan adanya sampah yang berserakan di beberapa tempat. Masalahnya itu juga berdampak pada penghasilan kami karena jika sampah banyak yang berserakan kan pengunjung pasti juga bakalan berkurang karena pasti mereka akan berpandangan kalau tempat ini tidak terlalu terurus, tapi sebenarnya sih semuanya juga karena ulah pengunjung juga, tapi alhamdulillah masalah ini sudah diatasi oleh pengelola wisata ini.
4.	Tindakan apa saja yang dilakukan oleh aparat kelurahan/kecamatan dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut?	Ada banyak tulisan-tulisan berisi kata-kata inspirasi menjaga kebersihan di beberapa sudut yang dimana pengunjung akan melewati dan melihatnya. Saya rasa itu adalah solusi yang cukup bagus.
5.	Apa saran dan harapan anda dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang terbangun di kawasan wisata	Kalau saran saya itu untuk pengelola-pengelola wisata mangrove ini untuk menambahkan semacam furnitur atau

	mangrove?	sesuatu yang bisa menarik minat pengunjung lah sehingga berdampak ke kita-kitanya juga ketika banyak pengunjung yang datang. Sedangkan harapan saya itu, tempat kita para Pedagang Kaki Lima alangkah baiknya direnofasi sedemikian dan senyamannya lah.
--	-----------	--

PEDOMAN WAWANCARA

DAMPAK EKONOMI WISATA MANGROVE

Nama : Rostina

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Kaki Lima)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana dampak ekonomi terhadap adanya wisata mangrove ?	Menguntungkan, karena jual-jualan saya banyak yang laku, terutama kerang-kerang yang tidak semua pedagang Kaki Lima menjualnya.
2.	Bagaimana pengaruh perekonomian masyarakat terhadap parawisata di sekitar kawasan wisata mangrove ?	Saya sangat bersyukur tidak menyia-nyaiakan kesempatan ini, ternyata dengan usaha kecil pun saya bisa mendapatkan banyak penghasilan. Ini semua karena wisata mangrove ini. Pokoknya sangat membantu ekonomi keluarga saya lah untuk keperluan sehari-hari dan untuk kebutuhan pendidikan anak. Biasanya setiap harinya itu bisa saya dapat penghasilan sekitar Rp 100.000 apalagi pada hari minggu, pengunjungnya meningkat dari hari-hari biasanya.
3.	Apa dampak datangnya wisatawan terhadap perekonomian di sekitar kawasan wisata mangrove ?	Jualan saya yang paling laku adalah kerang-kerang dengan motif-motif yang memang menarik pengunjung. Mungkin sama dengan Pedagang Kaki Lima yang lainnya. Kalau minuman dan makanan ringan juga banyak yang laku cuma mungkin karena di kafe-kafe apung kan tidak menjual berbagai macam kerang jadi yang lebih laku yah kerang-kerang-an. Biasanya pengunjung itu membeli kerang-kerang untuk oleh-oleh keluarga dan bisa juga dijadikan hiasan rumah.
4.	Bentuk kegiatan apa sajakah yang berdampak pada ekonomi	Pemberadaan motif pada kerang-kerang yang bervariasi sehingga

	masyarakat ?	membuat pengunjung tertarik untuk membelinya.
5.	Apakah pendapatan yang didapatkan dari tahun ke tahun semakin meningkat atau menurun? Mengapa?	Bisa dibilang meningkat karena sejauh ini pengunjung pun semakin banyak berdatangan.

PEDOMAN WAWANCARA

POLA PENGUASAAN RUANG WISATA MANGROVE

Nama : Irmawati
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengelola Kafe Apung)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pola pemanfaatan ruang yang ada di kawasan wisata Mangrove ?	Bentuk pola pemanfaatannya menurut saya adalah penyediaan lapangan kerja untuk kami yang sudah menjadi pemilik usaha berkat adanya wisata mangrove ini.
2.	Apa saja yang menjadi indikator dalam pengurusan IMB di kawasan wisata mangrove?	Saya cuma perlu izin dari pengelola wisata mangrove ini, tidak memungut biaya pajak usaha sama sekali karena pemerintah yang langsung menyediakan lahan usaha, selebihnya saya yang merenovasi kafe apung ini.
3.	Apakah ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan pemanfaatan ruang di kawasan wisata mangrove? Kalau ada, permasalahan-permasalahan pemanfaatan ruang seperti apakah yang saat ini terjadi?	Kalau saya sebenarnya lebih khawatir masalah abrasi karena kalau ombak naik otomatis kafe saya juga kemasukan air laut, barang-barang pun harus diamankan, pokoknya harus serba siaga untuk mengamankan kafe saya. Belum lagi kursi-kursi yang mudah terkena angin dan ombak sedikit saja sudah bergeser. Maklum lah dek di kafe saya ini cuma disediakan kursi plastik. Kadang juga saya berpikir untuk tidak buka kafe dulu karena yah begitu banyak yang dikhawatirkan.
4.	Tindakan apa saja yang dilakukan oleh aparat kelurahan/kecamatan dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut?	Pembuatan tanggul penahan ombak itu merupakan solusi yang bagus bagi saya sehingga kelancaran jualan saya di kafe apung juga tidak akan terganggu lagi karena ombak.
5.	Apa saran dan harapan anda dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang terbangun di kawasan wisata mangrove?	Saran saya adalah penyediaan wahana lebih lagi agar menarik minat pengunjung untuk datang. Harapan saya sih semoga pengunjung tidak

		bosan dan tidak takut datang karena masalah ini, lagipula kan pengelola juga sudah bertindak menangani masalah yang ada.
--	--	--

PEDOMAN WAWANCARA

DAMPAK EKONOMI WISATA MANGROVE

Nama : Irmawati
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengelola Kafe Apung)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana dampak ekonomi terhadap adanya wisata mangrove ?	Ekonomi saya pastinya sangat berbeda dibandingkan dengan setelah adanya wisata mangrove ini karena pendapatan saya sekarang bergantung pada tempat wisata ini.
2.	Bagaimana pengaruh perekonomian masyarakat terhadap parawisata di sekitar kawasan wisata mangrove ?	Kalau pengunjung banyak yang datang, pendapatan saya akan meningkat juga, jadi hasil yang saya dapatkan itu saya gunakan lagi untuk menyediakan dan menambahkan berbagai macam jual-jualan saya lagi, dan begitu seterusnya sehingga pengunjung tidak bosan dengan jenis jual-jualan yang itu-itu saja.
3.	Apa dampak datangnya wisatawan terhadap perekonomian di sekitar kawasan wisata mangrove ?	Kafe saya ini lebih dipadati pengunjung pada hari Minggu dibanding dengan hari-hari lainnya, mungkin karena hari libur. Kan kalau hari-hari lain orang-orang pada kerja dan juga waktunya sekolah. Kan pendapatan saya juga tergantung dari banyaknya pengunjung yang datang. Kalau ramai pengunjung yah pastinya makanan dan minuman saya juga banyak yang laku. Kafe ini memang yang paling diminati pengunjung karena tempatnya diatas air laut yang biasa di jadikan tempat untuk berfoto bersama keluarga.
4.	Bentuk kegiatan apa sajakah yang berdampak pada ekonomi masyarakat ?	Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, salah satu daya tarik pengunjung adalah selalu memperbarui jenis-jenis menu yang disediakan.

5.	Apakah pendapatan yang didapatkan dari tahun ke tahun semakin meningkat atau menurun? Mengapa?	Bagi saya pendapatan saya meningkat, semuanya kembali lagi ke seberapa banyak pengunjung yang datang.
----	--	---

PEDOMAN WAWANCARA

POLA PENGUASAAN RUANG WISATA MANGROVE

Nama : Diana

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Kaki Lima)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pola pemanfaatan ruang yang ada di kawasan wisata Mangrove ?	Menyediakan lahan, wahana, sekaligus tempat berkunjung keluarga yang bagus, yang tentunya akan mempengaruhi pendapatan untuk kami para pemilik usaha.
2.	Apa saja yang menjadi indikator dalam pengurusan IMB di kawasan wisata mangrove?	Pengurusannya hanya melapor kepada organisasi ACI yang juga telah bekerjasama dengan pihak Kepala Desa.
3.	Apakah ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan pemanfaatan ruang di kawasan wisata mangrove? Kalau ada, permasalahan-permasalahan pemanfaatan ruang seperti apakah yang saat ini terjadi?	Ada, minat pengunjung kurang dalam hal kebersihan, selain itu ombak juga kadang mencemaskan bagi pengunjung.
4.	Tindakan apa saja yang dilakukan oleh aparat kelurahan/kecamatan dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut?	Solusi yang dilakukan pihak pengelola dalam hal kebersihan yaitu menyediakan berbagai tempat sampah di beberapa sudut jalan, sedangkan solusi untuk ombak yang pasang adalah membangun tanggul penahan ombak.
5.	Apa saran dan harapan anda dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang terbangun di kawasan wisata mangrove?	Saran saya yaitu penyediaan tempat khusus foto boot keluarga atau pengunjung yang datang sehingga meningkatkan daya tarik pengunjung. Harapan saya semoga pengunjung semakin ramai lagi yang datang jadi kebutuhan ekonomi dan penghasilan kami pun juga meningkat.

PEDOMAN WAWANCARA

DAMPAK EKONOMI WISATA MANGROVE

Nama : Diana

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta (Pengelola Kafe Apung)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana dampak ekonomi terhadap adanya wisata mangrove ?	Semenjak adanya wisata mangrove ini pendapatan dari segi ekonomi saya mulai membaik jadi menurut saya dampak yang diberikan itu benar-benar positif.
2.	Bagaimana pengaruh perekonomian masyarakat terhadap parawisata di sekitar kawasan wisata mangrove ?	Kan kalau penghasilan saya meningkat atau lebih, saya bisa menambahkan lagi jenis-jenis jualan saya. Yah kalau perlu jualan yang ditambahkan itu jenis jualan yang belum disediakan di kafe apung. Jadi kan bisa menambah pemasokan. Kafe apung memang mempunyai jenis minuman yang beda dengan yang saya jual tapi kalau misalkan peminat ya lebih banyak di sini. Ka biasanya orang cari minuman dingin apalagi lebih murah dibanding di kafe apung.
3.	Apa dampak datangnya wisatawan terhadap perekonomian di sekitar kawasan wisata mangrove ?	Apabila banyak wisatawan yang datang, setahu saya kan ada dana untuk parkir dan karcis masuk jadi pengelola wisata mangrove ini bisa menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pengelolaan wisata sehingga mengundang daya tarik pengunjung ketika pengelolaannya juga mengalami peningkatan dari hari ke hari.
4.	Bentuk kegiatan apa sajakah yang berdampak pada ekonomi masyarakat ?	Menurut saya salah satu kegiatannya itu adalah penyebarluasan keberadaan wisata mangrove ini agar lebih dikenal lagi oleh khalayak ramai.
5.	Apakah pendapatan yang didapatkan dari tahun ke tahun	Kalau dihitung-hitung yah pendapatan saya tiap tahunnya meningkat. Ini

	<p>semakin meningkat atau menurun? Mengapa?</p>	<p>semua berkat para pengelola wisata mangrove, Kepala Desa dan organisasi Aku Cinta Indonesia (ACI), karena berkat mereka-mereka lah sehingga membuat wisata mangrove ini menjadi dikenal banyak orang. Jadi kan juga mengundang minat orang-orang datang berkunjung kesini. Kalau banyak yang tahu, banyak yang datang, otomatis pendapatan juga bertambah. Cukuplah untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak.</p>
--	---	---

DOKUMENTASI

Beberapa kafe apung yang ada di wisata mangrove Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai



Wawancara dengan pemilik kafe apung



Wawancara dengan para Pedagang Kaki Lima



Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima



PRPM Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai



Papan Informasi mengenai Hutan Mangrove



Wawancara dengan Kepala Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur



Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Aku Cinta Indonesia (ACI) yang sekaligus sebagai penanggungjawab wahana speedboat



RIWAYAT HIDUP



Wawan Kurniawan. Lahir di Sinjai, pada tanggal 15 Mei 1995. Anak kedua dari lima bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan H. Baharuddin dan Hj. Nuraeni. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Sinjai Utara mulai tahun 2001 sampai 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Sinjai Utara tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Sinjai Utara dan tamat pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2013 penulis berhasil lulus pada jurusan pendidikan sosiologi, fakultas keguruan ilmu dan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1) kependidikan. Dalam organisasi intra kampus penulis pernah menjadi pengurus HMJ sebagai anggota bidang tahun 2015-2016 dan ketua bidang di pengurusan BEM FKIP pada tahun 2016-2017, dan menyelesaikan studi pada tahun 2018 dengan gelar sarjana pendidikan dengan mengajarkan karya ilmiah yang berjudul “Wisata Mangrove (Studi Pola Penguasaan Ruang Masyarakat Lokal Dalam Mendorong Ekonomi Kerakyatan Desa Cempae Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai).